

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SDG's adalah singkatan dari "*Sustainable Development Goals*," yang dalam bahasa Indonesia disebut "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." SDG's adalah serangkaian 17 tujuan pembangunan global yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan." Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global yang ada, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, ketidaksetaraan gender, dan berbagai isu lingkungan lainnya. SDG's bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif untuk semua orang, tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Mereka mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan.

SDGs disahkan pada tanggal 25 september 2015, perwakilan dari seluruh negara anggota PBB secara resmi menerima dan menyetujui "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan." Agenda ini mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang terkait, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi. Setelah disahkan pada tahun 2015, negara-negara diharapkan untuk mengambil tindakan konkret untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada atau sebelum tahun 2030



Gambar 1-SDGs

Sumber : SDGs Bappenas.go.id

Terdapat 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan pada nomor 11. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 11 berfokus pada meningkatkan kualitas hidup di kota dan permukiman, menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa akses ke fasilitas dan layanan penting seperti perumahan, transportasi, dan ruang terbuka publik tersedia bagi semua warga, tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Tujuan ini juga menekankan pentingnya melindungi warisan budaya dan alam serta mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan perkotaan.

Strategi pengelolaan perpustakaan diintegrasikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 11 karena dengan adanya pengelolaan perpustakaan yang baik dapat membantu menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi kemacetan lalu lintas, emisi karbon, dan menciptakan ruang yang lebih nyaman bagi penduduk kota. Dalam aspek SDG's terdapat 3 aspek yaitu, *smart city*, *green city*, dan *lifeable city*. Penelitian ini

masuk ke dalam aspek *lifeable city* karena terdapat program yang dilakukan untuk implementasi SDGS di bidang transportasi dengan meningkatkan literasi jangka panjang seperti menyediakan akses sistem transportasi yang aman, andal, ramah pengguna, dan fleksibel bagi semua orang. Hal ini mampu mengurangi biaya angkutan umum dan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan khusus masyarakat dalam situasi seperti rumah kontrakan, perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Dengan mencapai aspek target ini membuat transportasi lebih inklusif dan memberikan akses yang lebih baik kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang mungkin memiliki kesulitan dalam mengakses sistem transportasi atau berisiko terhadap kecelakaan lalu lintas. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan transportasi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas bagi semua warga kota dan permukiman.

Penelitian strategi pengelolaan perpustakaan masuk ke dalam pilar pembangunan lingkungan karena secara langsung pengelolaan perpustakaan akan maksimal jika sudah sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan akan mewujudkan lingkungan yang nyaman dan tertib. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat. Solusi yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi isu-isu pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan SDG's yang berkelanjutan sebagai dukungan utama bagi semua kehidupan di bumi diupayakan secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan terus berbenah seiring dengan adanya Pembangunan berkelanjutan yang diterapkan SDG's.

Negara Indonesia memberikan wewenang dari pusat ke daerah. Sistem birokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola daerahnya sendiri yang disebut desentralisasi. Oleh karena itu setiap daerah memiliki otonomi sendiri dengan harapan mampu mewujudkan pemerintah yang mementingkan kepentingan publik. Pengawasan moda transportasi yang semakin banyak dan lahan parkir yang semakin sempit sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sehingga dibutuhkan strategi pengelolaan perparkiran yang baik. Pengelolaan perparkiran yang baik sangat dibutuhkan di semua fasilitas umum utamanya di kawasan yang padat penduduknya. Sistem pengelolaan perparkiran yang baik mencerminkan kebaikan ketersediaan fasilitas perparkiran.

Fasilitas perparkiran yang diharapkan adalah keamanan, kemudahan, dan kenyamanan. Kawasan parkir juga perlu disediakan oleh pemerintah karena tidak sembarang tempat bisa dijadikan lahan parkir supaya memberikan nyaman bagi semua orang dan kawasan parkir tidak mengganggu ketertiban umum. Strategi merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan. Strategi diselenggarakan berdasarkan pengambilan keputusan sebagai langkah yang akan dituju dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Strategi yang baik apabila sudah direncanakan terlebih dahulu sehingga mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Parkir adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi. Maka dari itu strategi pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo harus direncanakan dengan baik. Strategi

sebagai landasan untuk menentukan kesatuan arah bagi anggota organisasi karena konsep strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk diikuti oleh meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup dimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih konsumtif salah satunya dengan memiliki transportasi pribadi. Karena semakin banyaknya orang mempunyai kendaraan pribadi menyebabkan semakin sedikit ketersediaan kawasan parkir dan jalan umum akan mengalami kemacetan karena badan jalan sering digunakan sebagai tempat parkir liar yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Permasalahan dalam pengelolaan perparkiran membutuhkan perhatian bagi Kabupaten Purworejo khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Sudah menjadi tanggung jawab bahwa segala akar masalah pada tempat parkir tersebut seharusnya dilakukan oleh oknum yang memiliki tanggung jawab yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Daerah dengan strategi pengelolaan perparkiran yang lebih baik. Dalam strategi pengelolaan parkir dibutuhkan kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan pengelolaan parkir yang dikelola swasta atau pengelola parkir di fasilitas umum milik pemerintah daerah. Pengelolaan perparkiran merupakan alternatif untuk mengukur pencapaian dalam strategi pengelolaan perparkiran yang sudah berjalan untuk menuju keberhasilan yang ingin dicapai.



Gambar 2-Fenomena Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purworejo

Sumber : Dokumen Pribadi

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan perparkiran masih banyak terjadinya parkir liar di tepi jalan umum kabupaten purworejo tepatnya di depan pasar baledono. Pada kawasan itu mempunyai kondisi badan jalan umum yang terbatas dan memiliki tingkat arus lalu lintas yang tinggi, oleh karena itu kawasan tersebut tidak seharusnya menjadi tempat parkir karena dengan parkir di badan jalan akan menimbulkan kemacetan. Kebutuhan tentang fasilitas tempat parkir yang dikelola Dinas Perhubungan seharusnya menyediakan tempat untuk parkir supaya kendaraan yang parkir mudah dipantau dan dapat menjadikan daya tarik Kabupaten Purworejo karena tidak parkir semrawut.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Perparkiran	Petugas Perparkiran	Juru Parkir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan kepada Petugas Perparkiran untuk mengoperasikan perparkiran				Surat Perintah	5 menit	Perintah	
2	Menyerahkan dan mencatat bukti parkir/karcis ke juru parkir dan stiker ke petugas				Catatan	5 menit	Laporan	
3	Mengatur, menata kendaraan yang akan parkir guna kelancaran arus lalu lintas				Kegiatan	2 menit	Kendaraan tertata rapi dan arus lalu lintas lancar	
4	Mengabsensi petugas juru parkir baik di apel maupun di lapangan				Check List / Catatan	10 menit	Laporan	
5	Mencatat dan merekapitulasi setoran dari juru parkir				Catatan	10 menit	Laporan	
6	Menerima dan mengesahkan laporan dari petugas perparkiran mengenai pelaksanaan perparkiran				Laporan	10 menit	Laporan Harian	

Gambar 3-Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perparkiran

Sumber: Dokumen Dinas Perhubungan

Pada gambar 3 menunjukkan terdapat fasilitas umum tapi tidak dimbangi dengan kualitas pelayanan publik yang maksimal sehingga dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembuatan SOP Perparkiran ini bertujuan untuk mengontrol semua kegiatan perparkiran apakah telah sesuai dan berfungsi dengan baik dan efektif. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan petugas yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran petugas untuk mematuhi peraturan yang ada berdasarkan SOP yang berlaku. Dalam pengelolaan perparkiran diperlukan kerja sama antara Dinas Perhubungan dan masyarakat untuk menjaga keindahan Kabupaten Purworejo supaya tidak semrawut yang disebabkan oleh parkir liar.

Gambar 4-Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo

Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo bertugas untuk pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang perhubungan yang meliputi perpikiran. Dinas

Perhubungan Kabupaten Purworejo selalu melaksanakan tugas berdasarkan dengan visi pembangunan Kabupaten Purworejo. Dalam mengatur dan mengatasi setiap masalah kemacetan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan terhadap penertiban perparkiran di Kabupaten Purworejo. Karena sudah menjadi tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan pengawasan harus dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pengendalian operasional terhadap pemakai jalanan untuk kepentingan umum sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan supaya memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo.

Tabel 1-Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Unit), 2019-2021

Kab / Kota	2021	2020	2019
Kabupaten Cilacap	806833	752008	725053
Kabupaten Banyumas	739001	693638	673506
Kabupaten Purbalingga	382763	361588	349584
Kabupaten Banjarnegara	328457	320372	312287
Kabupaten Kebumen	520274	494111	473039
Kabupaten Purworejo	307142	297285	287428
Kabupaten Wonosobo	275842	265486	254972
Kabupaten Magelang	472549	454980	437411
Kabupaten Boyolali	475999	469412	452535
Kabupaten Klaten	733881	710411	686941
Kabupaten Sukoharjo	541604	526087	510570
Kabupaten Wonogiri	599815	377099	364948
Kabupaten Karanganyar	530619	466935	450928
Kabupaten Sragen	554873	524354	508777
Kabupaten Grobogan	594458	570575	546692
Kabupaten Blora	489637	369753	360118
Kabupaten Rembang	277395	257103	251701
Kabupaten Pati	633573	614722	595871
Kabupaten Kudus	495750	480262	464774

Kabupaten Jepara	618289	597237	576185
Kabupaten Demak	536842	522943	509044
Kabupaten Semarang	496605	474110	464135
Kabupaten Temanggung	270735	255366	247152
Kabupaten Kendal	496698	480569	464440
Kabupaten Batang	332822	319972	307122
Kabupaten Pekalongan	393793	386291	378789
Kabupaten Pemalang	543623	521992	500361
Kabupaten Tegal	611839	589296	566753
Kabupaten Brebes	759753	383749	571751
Kota Magelang	653872	369753	85634
Kota Surakarta	509927	465626	455822
Kota Salatiga	63276	120507	117680
Kota Semarang	1512234	1382434	1347260
Kota Pekalongan	201732	175182	169421
Kota Tegal	155155	162965	158940

Sumber: Website BPS Provinsi Jateng, 2019-2021

Pada Tabel 1 menunjukan bahwa dari 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten Purworejo 3 tahun terakhir dari tahun 2019-2021 angka kendaraan motor setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2019 kendaraan bermotor sebanyak 287.428, tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 297.285, sedangkan tahun 2021 meningkat sebanyak 307.142. Perkembangan transportasi mempunyai dampak negatif karena jumlah transportasi yang semakin signifikan sehingga melahirkan oknum pelanggaran parkir atau parkir liar. Para oknum pelanggar parkir melaksanakan perparkiran di lahan yang memicu kemacetan lalu lintas. Seharusnya parkir sebagai kebutuhan umum yang memiliki peran untuk membantu dalam memberikan pelayanan. Karena ketersediaan lahan parkir diatur berdasarkan dengan permintaan kebutuhan orang berkendara ketika berada pada suatu tempat. Kemacetan yang ditimbulkan oleh oknum pelanggar parkir tentunya menghasilkan keuntungan karena memanfaatkan bahu jalan atau

tepi jalan umum untuk digunakan sebagai kawasan parkir dan hal itu menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah setempat.

Petugas parkir yang tercatat resmi merupakan petugas parkir yang telah mendaftarkan diri di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sehingga mempunyai bukti Surat Keputusan (SK) dalam mengatur perparkiran. Petugas parkir resmi juga wajib memakai identitas seperti, rompi/jaket tukang parkir, topi, dan peluit. Sedangkan parkir liar merupakan parkir yang keberadaannya sangat mengganggu karena lahan yang dijadikan lokasi parkir itu illegal. Keberadaan pelanggaran parkir yang mengganggu lalu lintas harus segera diberi tindakan. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo harus mempunyai strategi pengelolaan dalam melaksanakan ketertiban berkendara dengan rangkaian peraturan yang bijaksana. Upaya itu harus memperoleh dukungan dan kerja sama dari masyarakat supaya terlaksana dengan baik.



Gambar 5-Dinas Perhubungan melakukan Monitoring
Sumber: Website Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo

Pada Gambar 5 menunjukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sedang melakukan pengawasan dan *monitoring* titik parkir di Kabupaten Purworejo. Petugas melakukan pengawasan kepada juru parkir untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Menurut Perda Kabupaten Purworejo Nomor 24 tahun 2019 Pasal 11 Tentang besarnya tarif retribusi parkir ditetapkan bahwa (1) kendaraan bermotor roda 2: Rp 1.000 (2) kendaraan bermotor roda 3: Rp 2.000 (3) kendaraan bermotor roda 4: Rp 2.000 (4) kendaraan bermotor roda 6: Rp 3.000 (5) kendaraan bermotor roda lebih dari 6: Rp 5.000. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan parkir supaya memberikan karcis kepada para pengendara karena sebagai tanda bahwa itu parkir resmi dari Dinas Perhubungan. Kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada para petugas parkir dengan memberikan himbauan kepada petugas parkir agar dalam melaksanakan tugas pengelolaan parkir, tetap selalu berpedoman pada aturan yang berlaku, dengan memberi karcis pada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan selalu humanis untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan pada pelayanan perparkiran menjadi hal utama yang berhubungan dengan pengelolaan perparkiran terutama pada petugas parkir. Dikarenakan masih banyaknya juru parkir yang melanggar peraturan dalam karcis parkir yang disalahgunakan. Perparkiran juga mampu meningkatkan perekonomian daerah karena sebagai sumber pendapatan yang sangat potensial. Pendapatan yang didapatkan mampu meningkatkan retribusi dan pendapatan daerah sehingga secara langsung pengelolaan perparkiran yang bermutu akan menciptakan pundi-pundi uang yang masuk di Kabupaten Purworejo. Dalam proses penetapan tarif parkir harus

melihat kondisi mayoritas masyarakat yang ada di Purworejo, karena tarif tersebut akan menghasilkan keuntungan dan melihat perekonomian mayoritas masyarakat.

Tabel 2-Jumlah Titik Parkir Setiap Rayon Di Kabupaten Purworejo

NO	RAYON	JUMLAH TITIK PARKIR RESMI	JUMLAH PETUGAS PARKIR
1	RAYON 1	28	52
2	RAYON 2	27	34
3	RAYON 3	28	32
4	RAYON 4	20	37
5	RAYON 5	25	39
6	RAYON 6	17	24
7	RAYON 7	20	24

Sumber: Dokumen Dinas Perhubungan, 2022

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Purworejo memiliki pembagian tujuh Rayon. Setiap Rayon memiliki Jumlah titik parkir resmi yang berbeda dan memiliki jumlah petugas parkir yang berbeda. Untuk Rayon 1 memiliki Titik parkir sebanyak 28 titik dengan jumlah petugas parkir 52. Rayon 2 memiliki titik parkir resmi sebanyak 27 dengan jumlah petugas parkir 34. Rayon 3 memiliki titik parkir resmi 28 dengan jumlah petuguas parkir sebanyak 32. Rayon 4 memiliki titik parkir resmi sebanyak 20 dengan jumlah petugas parkir 37. Rayon 5 memiliki titik parkir resmi dengan jumlah titik parkir resmi 25 dengan jumlah petugas parkir 39. Rayon 6 memiliki jumlah titik parkir resmi 17 dengan petugas parkir 24. Terakhir rayon 7 memiliki titik parkir resmi 20 dengan petugas parkir 24.



Gambar 6-Peta Kemacetan Kabupaten Purworejo

Sumber : Website Dinas Perhubungan Jawa Tengah

Pada Gambar tersebut menunjukkan bahwa warna hijau dalam peta menunjukkan titik kemacetan yang sering terjadi di Kabupaten Purworejo. Purworejo memiliki posisi yang strategis sebagai bagian dari jalur lintas selatan Pulau Jawa. Jalur lintas selatan ini merupakan rute transportasi yang penting karena menghubungkan berbagai kota dan daerah di bagian selatan Pulau Jawa. Sebagai bagian dari jalur lintas selatan, Purworejo memiliki peran penting dalam konektivitas transportasi antara kota-kota besar seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Jalan-jalan utama yang melintasi Purworejo, seperti Jalan Nasional Rute 1 (Jalur Pantura) dan Jalan Nasional Rute 7, menjadi bagian dari jaringan transportasi

1.2.identifikasi Masalah

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo belum maksimal dalam pengelolaan perparkiran, hal ini dibuktikan dengan masih banyak parkir liar di badan jalan umum yang menyebabkan kemacetan
2. SOP penyelenggaraan perparkiran masih terdapat pelanggaran, karena petugas parkir tidak menggunakan karcis parkir dan menaikkan tarif parkir.
3. Kurangnya kesadaran pada masyarakat untuk tidak parkir liar dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

1.3.Rumusan Masalah

1. Apa tahapan perencanaan strategis dalam menentukan keberhasilan pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ?
2. Bagaimana strategi pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ?

1.4.Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tahapan perencanaan strategis dalam menentukan keberhasilan pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
2. Menganalisis strategi pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

1.5. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berharap bisa memberikan tambahan wawasan ilmu Pendidikan secara luas kepada pembaca tentang Strategi Pengelolaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dan memberikan informasi detail untuk perkembangan ilmu administrasi publik.

Kegunaan Praktis

1. Penulis, penelitian ini dilakukan bisa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat mengenai Strategi Pengelolaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
2. Universitas, dapat menambah jumlah karya tulis ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi untuk riset-riset berikutnya.
3. Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan arahan yang berguna sebagai upaya penyempurnaan, penguatan, dan penyusunan ulang Strategi Pengelolaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

1.6. Kajian Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 3-Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian Teori	Hasil Penelitian
1	Noviantoro Dinar dan Ferry Abraham (2023) Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar di Kota Surabaya	Meneliti bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara pemberian pembinaan dan fasilitas untuk menertibkan lalu lintas di jalan raya dan memenuhi ketersedian tempat parkir yang memadai untuk masyarakat Kota Surabaya	Deskriptif kualitatif Teori yang digunakan (Wulandari 2015) Indikator yang menyebabkan adanya parkir liar	Kegiatan sosialisasi dan teguran simpatik oleh pemerintah daerah yang bisa saja terjadi ketidakefektifan sehingga mampu menimbulkan terjadinya parkir liar di tempat umum.
2	Andry Hendry dan Zulkifli (2023) Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Mengetahui evaluasi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.	Deskriptif Kualitatif Teori digunakan Kebijakan Publik Teori <i>George Edward</i>	Memberikan ide bahwa sudah terlaksananya evaluasi terhadap pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru yang sudah diidentifikasi di Kota Pekanbaru

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/ Teori	Hasil Penelitian
			III, (Nur & Guntur, 2019 Manajemen Publik (Safroni, 2012) Evaluasi Fattah, 2013) Evaluasi Kebijakan (Winarno, 2014)	berdasarkan 5 indikator penilaian (efektivitas, efisiensi, kecukupan, daya tanggap, dan akurasi), maka pengelolaan parkir belum dilaksanakan dengan baik. Ini terjadi karena kurangnya perhatian dari Kota Pekanbaru.
3	Rahmadhia Faiz dan Retno Nunik (2022) Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang dilihat dari Perspektif <i>Good Governance</i>	Mengetahui tata kelola perparkiran Kota Semarang yang dilihat dari perspektif <i>Good Governance</i> .	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Tata Kelola Pemerintah (Laloma & Plangitan, 2018) <i>Good Governance</i> Twomey, A. (2015)	Pengelolaan perparkiran Kota Semarang terutama di wilayah Taman Indonesia Kaya dari aspek transparansi sudah terdapat akses kemudahan, namun terjadi pemberian alasan yang tidak jelas pada data itu. Kemudahan dalam mengakses data masih terbilang jauh dari kesempurnaan dan berkaitan langsung untuk penerimaan pembukaan yang belum maksimal.

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/ Teori	Hasil Penelitian
				hal itu disebabkan karena terdapat rekapitulasi setiap agenda yang selanjutnya memberikan kebingungan untuk melaksanakan pengecekan pada realisasi dari adanya penerimaan itu.
4	Budiawan Riko dan Afrizal Najmuddin (2019) Analisis implementasi kebijakan Kerjasama pengelolaan parkir dalam mewujudkan <i>good governance</i> pengelolaan parkir di Kota Solok	Analisis terkait implementasi kebijakan untuk bekerja sama dalam pengelolaan perparkiran, dimana berapa tahun kebelakang pengelolaan dan pelayanan masih menjadi bahan perbincangan yang belum terselesaikan oleh masyarakat dan media local.	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Implementasi Kebijakan Grindle dalam Nirmala Mustika Dewi (2015) Faktor keberhasilan pengembangan pelayanan publik Dwiyanto (1996: 19-20)	Masih ada kelemahan dalam kemajuan implementasi kebijakan terkait pengelolaan taman yang bertujuan untuk mendukung tata kelola yang efektif dalam pengelolaan taman di Kota Solok.

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/ Teori	Hasil Penelitian
5	Walean Andrew, Kaunang Markus, dan Kimbal Marthen (2019) Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Manado Provinsi Sulawesi	Analisis terkait strategi dinas perhubungan dalam menyelesaikan kemacetan lalu lintas di Kota Manado	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Perencanaan Strategi (Salusu, 1996: 102)	Menyelesaikan permasalahan kemacetan Kota Manado, secara komprehensif. Hal ini terlihat dari penerapan strategi lalu lintas dan parkir satu arah oleh Dinas Perhubungan yang telah dimulai, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti penegakan aturan yang tidak konsisten dan pemberian sanksi yang keras terhadap pelanggar yang menyebabkan kebingungan.
6.	Fedy Aris Tiadi Tangabali1, Fajar Apriani dan Santi Rande (2019) Pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda	Mendeskripsikan dan memberikan analisis dalam pengelolaan penataan perparkiran yang terjadi di tepi jalan umum oleh petugas parkir terdaftar untuk mengetahui faktor penghambatnya	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Kebijakan Publik menurut Dye dan Anderson (dalam Agustino 2008:4)	Manajemen dan tata Kelola parkir di tepi jalan umum oleh petugas parkir masih belum optimal sesuai dengan peraturan daerah kota samarinda No 5

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/ Teori	Hasil Penelitian
			Perencanaan Strategi (Salusu, 1996: 102) Implementasi Kebijakan Nugroho (2009:494-495)	2015 tentang pengelolaan dan pemenuhan penataan perparkiran yang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
7	Rahmad Rahmad dan Nasfi Nasfi (2019) Manajemen Strategik Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir	Mengetahui bagaimana faktor yang telah memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi dari adanya retribusi parkir. Manajemen strategi untuk peningkatan retribusi parkir	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Manajemen Strategik (Hunger, David dan Platak dalam Pricilla (2020) PAD (Endri et al., 2021)	Faktor yang telah memberikan pengaruh retribusi parkir telah dilihat dari kekuatan dimana, lokasi titik parkir masih mencukupi, dengan adanya peraturan dalam setoran retribusi sudah sesuai dengan SOP. Peningkatan retribusi parkir mampu dilihat dari aspek kelemahan dimana masih kurang dalam memberikan pengawasan.

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/ Teori	Hasil Penelitian
8	Ragel Dwi Puspita Sari dan Abdul Sadad (2023) Pengawasan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru	Menyajikan dan mengevaluasi bagaimana penyedia jasa membantu pemeliharaan parkir di kota Pekanbaru, serta menganalisa elemen-elemen untuk mempengaruhi kurangnya pengawasan terhadap jasa pemeliharaan di kota Pekanbaru.	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Teori pengawasan yang efektif menurut T. Hani Handoko dalam Wibawa (2022: 71)	Pengawasan terhadap pelayanan parkir di Kota Pekanbaru, yang telah dilakukan, masih belum maksimal. Hal ini juga bisa memperhatikan empat indikator prediktif: akurasi, keandalan, ketepatan waktu, dan fleksibilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pelayanan parkir di Pekanbaru mencakup: 1) unsur sumber daya manusia; 2) unsur sarana dan prasarana.
9	Hendry Andry dan Zulkifli (2023) Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Mengetahui evaluasi parkir pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Kebijakan Publik Berdasarkan Teori	Pengelolaan parkir tidak terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/Teori	Hasil Penelitian
			George Edward III, (Nur & Guntur, 2019) Manajemen Publik ((Safroni, 2012) Evaluasi (Fattah, 2013)	Perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Pelayanan Transportasi menjadi dua faktor penting yaitu faktor komunikasi dan faktor pengawasan. Untuk itu, ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah tentang sosialisasi kebijakan terkini (khususnya mengenai kenaikan tarif parkir)
10	Rusnaedi (2022) Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Watampone Kabupaten Bone	Memberikan analisis dan rumusan strategi dinas perhubungan kota watampone untuk mengatasi masalah parkir liar di tepi jalan umum	Deskriptif Kualitatif Teori digunakan Faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar (. Menurut Satori dan Komariah (2014:22)	Beberapa petugas parkir liar yang ada di jalan sukawati sampai jalan KF Tandean belum ditetapkan sebagai petugas parkir resmi Dinas Perhubungan Kota Watampone. Seluruh titik parkir di area pusat strategis di dominasi oleh oleh petugas parkir resmi Dinas Perhubungan. Namun dengan adanya peraturan yang bisa mendisiplinkan petugas parkir resmi dan nonresmi masih diperoleh banyak pelanggaran. Yang di dominasi tidak memberikan karcis kepada pelanggan dan tidak mengenakan atribut lengkap.

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/ Teori	Hasil Penelitian
11	Madeleine Cania, Roni Ekha Putera dan Yoserizal (2022) Diagnosis, Panduan dan Tindakan Koheren Dalam Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang	Mengetahui dan mendeskripsikan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Konsep strategi (Rumelt, 2015)	Dinas Perhubungan Kota Padang sudah berhasil mengenali empat variabel dari teori strategis yang diajukan oleh Rumelt. Meskipun telah berhasil menerapkan strategi untuk mengurangi aktivitas saksi palsu di wilayahnya, masih ada beberapa masalah yang menyebabkan strategi yang diimplementasikan tidak optimal.
12	Ahmad Nizar Simatupang, Morida Siagian dan Dwi Lindarto Hadinugroho (2022) Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan	Memberikan analisis untuk mengelola dan kebijakan perparkiran yang sesuai dengan peraturan pada daerah pasar petisah supaya menciptakan daerah parkir yang tertib dan nyaman.	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Kebijakan Pengelolaan Parkir Pasar Petisah (Kadarisman, Gunawan & Ismiyati, 2016)	Petisah Pasar telah menetapkan area taman dengan berbagai jenis taman, termasuk area taman di halaman dan taman di dalam halaman basement petisah. Pengelolaan optimal dari area parkir dalam lingkungan yang ramah anak telah menciptakan kawasan taman yang menyenangkan.

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/ Teori	Hasil Penelitian
13	Taylor Elizabeth (2021) <i>Free parking for free people: German road laws and rights as constraints on local car parking management</i>	Mengkaji bagaimana norma dan hak hukum tingkat tinggi yang berkaitan dengan jalan umum membentuk dan membatasi manajemen parkir di kota Jerman yang heterogen.	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Parkir Ilegal Scheiner et al. (2020)	Membandingkan pendekatan parkir mobil di kota Jerman dengan pembagian moda transportasi yang berbeda pada tinjauan desktop tentang parkir dan undang-undang.
14	Popescu Raluca (2022) <i>The culture of parking on the sidewalks</i>	Memahami dinamika mobil-pejalan kaki di trotoar perumahan.	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Penerapan Ruang Publik (Hamilton-Baillie, 2008)	Praktek parkir di lingkungan pusat Bucharest mengaburkan perbedaan antara trotoar dan jalan, membutuhkan cara baru untuk mengonseptualisasikan infrastruktur mobil dan jalan kaki
15	Yan Gen (2022) <i>Operation Concept and Mode Selection Design of Public Parking Lot</i>	Menganalisis perbedaan dalam manajemen konsep tempat parkir umum untuk kendaraan sosial, dan kemudian menyelidiki dan menganalisis	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Operasi Parkir Mobil (Wang Li ying 2015)	Efektif dalam pengelolaan dan pengoperasian tempat parkir umum yang ada akan memaksimalkan efektivitas ruang terbatas dari tempat parkir umum dan memaksimalkan pendapatan dalam pengelolaan dan pengoperasian tempat parkir umum yang ada akan memaksimalkan ruang.

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/ Teori	Hasil Penelitian
		manajemen yang buruk dan keterlambatan pembangunan tempat parkir umum		Efektif dalam pengelolaan dan pengoperasian tempat parkir umum yang ada akan memaksimalkan efektivitas ruang terbatas dari tempat parkir umum dan memaksimalkan pendapatan.
16	Chullabodhi Chalermpong Saksith, dan Ratanawaraha Apiwat (2022) <i>Examining the Root Causes of On-Street Parking Mismanagement in Central Bangkok</i>	Mengidentifikasi delapan akar penyebab manajemen parkir di badan jalan yang tidak efektif yang berasal dari <i>misalignment</i> .	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Kebijakan Parkir (Kodransky & Hermann, 2011)	Beberapa langkah tindakan prioritas diusulkan untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengelola secara efektif parkir di jalan di Bangkok.
17	Tasente Tănase dan Isabella Mari (2023) <i>Collaborative Parking Management in Constanta: The Role of Public Policy and Citizen Participation</i>	Mengevaluasi warga tentang tempat parkir di Constanta dan mengidentifikasi solusi potensial untuk memperbaiki situasi saat ini. manajemen yang buruk dan keterlambatan Pembangunan tempat parkir	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Kebijakan Publik (George Edward III)	Parkir Constanta Menyoroti perlunya kebijakan dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ketersediaan parkir di kota. Pemerintah harus membuat strategi. Efektif dalam pengelolaan dan pengoperasian tempat parkir umum yang ada akan memaksimalkan efektivitas ruang terbatas dan pendapatan

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian/Teori	Hasil Penelitian
18	Immanuel Panusunan Tua Panggabean, Sirojuzilam , Suwardi Lubis dan Agus Purwoko (2022) <i>Parking Management in Supporting Sustainable Development</i>	Mengidentifikasi konsep dan teori yang dapat merumuskan paradigma baru dari manajemen parkir, mengeksplorasi pengelolaan parkir hendaknya dilakukan dengan pendekatan penelitian khusus	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Evolusi Kebijakan (Mingardo, 2015)	Dampak pengelolaan parkir dievaluasi berdasarkan trend pada indikator tertentu pada jangka waktu tertentu. Terdapat keberhasilan penerapan kebijakan parkir di suatu kota.
19	Todd Litman (2023) <i>Parking Management</i>	Mengidentifikasi masalah-masalah dalam perencanaan parkir saat ini, membahas biaya fasilitas parkir dan potensi penghematan dari perbaikan manajemen	Deskriptif Kualitatif Teori yang digunakan Manajemen Parkir (Planners Press, 2006)	Solusi manajemen mewakili perubahan dari praktik yang ada saat ini sehingga berbagai hambatan harus dihadapi diatasi agar pengelolaan parkir dapat maksimal
20	Anang Pramono dan M. Ali Shodikin (2022) <i>Implementation of Android-Based Parking Management Applications</i>	Mengelola area parkir dengan maksimal, tidak dilakukan dalam satu aspek segi informasi saja namun juga keseluruhan aspek dari segi pembayaran dengan memanfaatkan metode pembayaran digital	Deskriptif Kualitatif	Ketersediaan tempat parkir yang terbatas dan belum tersedianya sistem parkir yang dapat menunjang kemudahan pengelolaan parkir. Aplikasi parkir dikembangkan sebagai alternatif yang memberikan solusi pengguna

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Dinar Noviantoro dan Abraham Ferry Rosando (2023) dalam tulisannya yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya” bertujuan untuk meneliti bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara pemberian pembinaan dan fasilitas untuk menertibkan lalu lintas di jalan raya dan memenuhi ketersediaan tempat parkir yang memadai untuk masyarakat Kota Surabaya. Penelitian ini telah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dalam penelitian ini terdapat kegiatan sosialisasi dan teguran simpatik oleh pemerintah daerah yang bisa saja terjadi ketidakefektifan sehingga mampu menimbulkan terjadinya parkir liar di tempat umum.

Hendry Andry dan Zulkifli (2023) dalam tulisannya yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” bertujuan untuk mengetahui evaluasi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini sudah mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian ini telah memberikan ide bahwa sudah terlaksananya evaluasi terhadap pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru yang sudah diidentifikasi dan terbagi 5 indikator penilaian (efektivitas, efisiensi, kecukupan, daya tanggap, dan akurasi), maka pengelolaan parkir belum dilaksanakan dengan baik. Ini terjadi karena kurangnya perhatian dari Kota Pekanbaru.

Faiz Rahmadhia dan Nunik Retno (2022) dalam tulisannya berjudul “Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif *Good Governance*” bertujuan untuk mengetahui pengelolaan perparkiran Kota Semarang yang diukur

dari perspektif *Good Governance*. Penelitian ini sudah mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dalam penelitian ini adanya pengelolaan perparkiran Kota Semarang terutama di lingkungan Taman Indonesia Kaya dari aspek transparansi sudah terdapat akses kemudahan, tapi masih terjadi pemberian alasan yang tidak jelas pada data itu. Kemudahan dalam mengakses data masih terbilang jauh dari kesempurnaan dan berkaitan langsung untuk penerimaan pembukaan yang belum maksimal, hal itu disebabkan karena terdapat rekapitulasi setiap agenda yang selanjutnya memberikan kebingungan untuk melaksanakan pengecekan pada realisasi dari adanya penerimaan itu.

Riko Budiawan, Afrizal, dan Najmudin (2019) dalam tulisannya berjudul “Analisis implementasi kebijakan Kerjasama pengelolaan parkir dalam mewujudkan *good governance* pengelolaan parkir di Kota Solok” bertujuan untuk memberikan analisis terkait implementasi kebijakan untuk bekerja sama dalam pengelolaan perparkiran di Kota Solok, dimana berapa tahun kebelakang pengelolaan dan pelayanan masih menjadi bahan perbincangan yang belum terselesaikan oleh masyarakat dan media lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian ini telah memberikan petunjuk bahwasannya terdapat kelemahan implementasi kebijakan dalam pengelolaan perparkiran untuk mewujudkan *Good Governance* pengelolaan perparkiran di Kota Solok

Andrew Walean, Markhus Kaunang, dan Marthen Kimbal (2019) dalam tulisannya yang berjudul “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Manado Provinsi Sulawesi’ mempunyai tujuan untuk memberikan analisis terkait strategi dinas perhubungan dalam menyelesaikan kemacetan lalu lintas di Kota Manado. Penelitian ini telah mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini telah memberikan hasil bahwa strategi dinas perhubungan untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Manado, belum dilaksanakan secara maksimal hal itu mampu terlihat dari penerapan one way traffic dan penataan parkir dalam strategi Organisasi Dinas Perhubungan yang sudah berjalan dalam melaksanakan tugas namun masih terdapat kelemahan yaitu kurangnya Tindakan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar lalu lintas seperti adanya parkir liar.

Fedy Aris Tiadi Tangabali, Fajar Apriani dan Santi Rande (2019) dalam tulisannya yang berjudul “ Pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda” memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan analisis dalam pengelolaan penataan perparkiran yang terjadi di tepi jalan umum oleh petugas parkir terdaftar di Kota Samarinda serta untuk mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen dan tata Kelola parkir di tepi jalan umum oleh petugas parkir belum mampu terlaksana secara maksimal sesuai dengan peraturan daerah kota samarinda No 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemenuhan penataan perparkiran yang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Rahmad Rahmad dan Nasfi Nasfi (2019) dalam tulisannya yang berjudul “Manajemen Strategik Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir” mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor yang telah memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi dari adanya retribusi parkir. Manajemen strategi untuk peningkatan retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor yang telah memberikan pengaruh retribusi parkir telah dilihat dari kekuatan dimana, lokasi titik parkir masih mencukupi, dengan adanya peraturan dalam memberikan setoran retribusi sudah sesuai dengan SOP. Peningkatan retribusi parkir mampu dilihat dari aspek kelemahan dimana masih kurang dalam memberikan pengawasan.

Ragel Dwi Puspita Sari dan Abdul Sadad (2023)) dalam tulisannya yang berjudul “Pengawasan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru” mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memberikan analisis bagaimana pengawasan jasa dalam pelayanan perparkiran di Kota Pekanbaru serta memberikan identifikasi dan analisis faktor yang menimbulkan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa pelayanan perparkiran di Kota Pekanbaru.. Penelitian ini juga mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan pengawasan pada jasa pelayanan perparkiran di Kota Pekanbaru yang sudah terlaksana namun masih tidak efektif. Hal tersebut juga diidentifikasi dari 4 indikator pengawasan yang Akurat, Terpusat, Tepat Waktu, dan Fleksibel. Faktor penghambat dalam terlaksananya pengawasan jasa pelayanan perparkiran di Kota

Pekanbaru yaitu: 1) Faktor sumber daya manusia, , 2) Faktor sarana dan prasarana.

Hendry Andry dan Zulkifli (2023) dalam tulisannya yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” bertujuan untuk mengetahui evaluasi parkir pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian pengelolaan parkir tidak terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Pelayanan Transportasi menjadi dua faktor penting yaitu faktor komunikasi dan faktor pengawasan. Untuk itu, ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah tentang sosialisasi kebijakan terkini (khususnya mengenai kenaikan tarif parkir)

Rusnaedi (2022) dalam tulisannya yang berjudul “Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Watampone Kabupaten Bone” mempunyai tujuan untuk memberikan analisis dan rumusan strategi dinas perhubungan kota watampone untuk mengatasi permasalahan parkir liar di tepi jalan umum. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut beberapa petugas parkir liar yang ada di jalan sukawati sampai jalan KF Tandean belum menjadi petugas parkir resmi Dinas Perhubungan Kota Watampone. Seluruh titik parkir di area pusat keramaian di dominasi oleh petugas parkir resmi Dinas Perhubungan. Namun dengan adanya peraturan yang bisa mendisiplinkan petugas parkir resmi dan nonresmi masih diperoleh banyak pelanggaran. Pelanggaran paling banyak di

dominasi oleh pemberian karcis kepada pelanggan dan tidak menggunakan atribut lengkap.

Ahmad Nizar Simatupang, Morida Siagian dan Dwi Lindarto Hadinugroho (2022)) dalam tulisannya yang berjudul ‘Parkir di daerah Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan” bertujuan untuk memberikan analisis pengelolaan dan kebijakan perparkiran yang sesuai dengan peraturan di daerah pasar petisah supaya menciptakan daerah parkir yang tertib dan nyaman. Penelitian mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian tersebut pasar petisah sudah mempunyai lokasi parkir dengan beberapa jenis parkir yang diantaranya parkir di badan jalan dan parkir diluar badan jalan yang berlokasi di basement pasar petisah. Kebijakan pengelolaan perparkiran berjalan secara maksimal pada daerah pasar petisah anak menciptakan daerah lokasi parkir yang nyaman dan tertib.

Elizabeth Taylor (2021) dalam tulisannya yang berjudul “*Free parking for free people: German road laws and rights as constraints on local car parking management*” bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma dan hak hukum tingkat tinggi yang berkaitan dengan jalan umum membentuk dan membatasi manajemen parkir di kota-kota Jerman yang heterogen. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah membandingkan pendekatan parkir mobil di kota Jerman dengan pembagian moda transportasi yang berbeda pada tinjauan desktop tentang parkir dan undang-undang.

Raluca Popescu (2022) dalam tulisannya yang berjudul *“The culture of parking on the sidewalks”* bertujuan untuk memahami dinamika mobil pejalan kaki di trotoar perumahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah praktik parkir di lingkungan pusat Bucharest mengaburkan perbedaan antara trotoar dan jalan yang membutuhkan cara baru untuk mengonseptualisasikan infrastruktur mobil dan jalan kaki.

Yan Gen (2022) dalam tulisannya yang berjudul *”Operation Concept and Mode Selection Design of Public Parking Lot”* bertujuan untuk menganalisis perbedaan dalam manajemen konsep tempat parkir umum untuk kendaraan sosial, dan kemudian menyelidiki dan menganalisis alasan manajemen yang buruk dan keterlambatan pembangunan tempat parkir umum. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Efektif dalam pengelolaan dan pengoperasian tempat parkir umum yang ada akan memaksimalkan efektivitas ruang terbatas dari tempat parkir umum dan memaksimalkan pendapatan.

Chullabodhi Chakaphan, Chalermpong Saksith, dan Ratanawaraha Apiwat (2022) yang berjudul *“ Examining the Root Causes of On-Street Parking Mismanagement in Central Bangkok”* bertujuan untuk mengidentifikasi delapan akar penyebab manajemen parkir di badan jalan yang tidak efektif yang berasal dari misalignment. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Beberapa langkah tindakan prioritas

diusulkan untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengelola secara efektif parkir di jalan di Bangkok.

Tasențe Tănase dan Isabella MarI (2023) dalam tulisannya yang berjudul *“Collaborative Parking Management in Constanta: The Role of Public Policy and Citizen Participation”* bertujuan untuk mengevaluasi persepsi warga tentang tempat parkir di Constanta dan mengidentifikasi solusi potensial untuk memperbaiki situasi saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Parkir di kotamadya Constanta menyoroti perlunya kebijakan dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ketersediaan parkir di kota. Pemerintah kota harus mempertimbangkan berbagai strategi, seperti membangun tempat parkir baru.

Immanuel Panusunan Tua Panggabean, Sirojuzilam , Suwardi Lubis dan Agus Purwoko (2022) dalam tulisannya yang berjudul *“Parking Management in Supporting Sustainable Development”* bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan teori yang dapat merumuskan paradigma baru dari manajemen parkir. Dari tema keberlanjutan, mengeksplorasi pengelolaan parkir hendaknya dilakukan dengan pendekatan penelitian khusus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian dampak pengelolaan parkir dievaluasi berdasarkan trend pada indikator tertentu pada jangka waktu tertentu. Terdapat keberhasilan penerapan kebijakan parkir di suatu kota.

Todd Litman (2023) dalam tulisannya yang berjudul *“Parking Management”* bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam perencanaan parkir saat ini, membahas biaya fasilitas parkir dan potensi

penghematan dari perbaikan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian solusi manajemen mewakili perubahan dari praktik yang ada saat ini sehingga berbagai hambatan harus dihadapi diatasi agar Anang Pramono dan M. Ali Shodikin (2022)

Anang Pramono dan M. Ali Shodikin (2022) dalam tulisannya yang berjudul *“Implementation of Android-Based Parking Management Applications”* bertujuan untuk mengelola area parkir dengan efisien sistem, tidak hanya dari segi informasi tetapi juga dari segi pembayaran, dengan memanfaatkan metode pembayaran digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian Ketersediaan tempat parkir yang terbatas dan belum tersedianya sistem parkir yang dapat menunjang kemudahan pengelolaan parkir. Aplikasi parkir dikembangkan berbasis Android merupakan alternatif yang memberikan solusi ramah pengguna dan manajemen parkir. Aplikasi telah bekerja dengan baik berdasarkan uji coba.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas,persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan terkait strategi pengelolaan perparkiran oleh dinas perhubungan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini ada pada fokus dan lokus yang diteliti, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan

1.6.2. Administrasi Publik

Administrasi publik secara lebih dalam bisa diartikan sebagai hal yang dilakukan pemerintah, terutama dalam Lembaga eksekutifnya, supaya bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam kemasyarakatan (Nigro&Nigro 1984: 3-4). Menurut Pasolong (2007) administrasi publik adalah sekumpulan manusia yang mampu bekerja sama untuk menjalankan tugas negara secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan publik. Zauhar(2001) administrasi publik sebagai acuan pada kerja sama yang sudah ditetapkan dalam organisasi publik sehingga mampu memberikan layanan publik. Administrasi publik sudah diberikan garis besar bagaimana aktor pemerintah mampu menjalankan tugas negara dengan efektif. Administrasi publik didefinisikan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) sebagai cara untuk mengelola kemampuan dengan cara terorganisir sehingga sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Segala hal mengenai kebijakan mampu ditunjukan oleh masyarakat umum dan sudah disusun, dilaksanakan, dan dikelola untuk melakukan musyawarah.

Menurut Yeremias T Keban (2014:4), menunjukkan bagaimana peran pemerintah yang aktif dalam mengatur hal yang menurutnya berguna bagi kepentingan masyarakat. Maka Administrasi publik dapat disimpulkan sebagai upaya untuk menjalin kerjasama antara sekelompok orang dalam ruang organisasi atau instansi pemerintahan yang memiliki hubungan erat dengan tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan publik masyarakat juga mencapai pemerintahan yang baik.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Thomas Kuhn (dalam Inu Kencana, 2016:34) memberikan pendapat tentang paradigma yang mampu dijelaskan dari suatu sudut pandang untuk mengetahui nilai dasar atau pendekatan yang digunakan untuk bidang sosial sehingga mampu menyelesaikan permasalahan. Anomalies telah dilakukan dalam perkembangan ilmu administrasi publik dan terdapat 6 paradigma administrasi publik sebagai berikut (Keban, 2014):

A. Paradigma I (1990 - 1926)

Paradigma memiliki arti yang luas sebagai istilah yang mampu dipergunakan untuk mengetahui paradigma ini lebih dalam. Pada buku *Goodnow "Politics and Administration"* sudah dinyatakan bahwasannya terdapat perbedaan yang terjadi dalam politik administrasi. Menurut *Goodnow*, negara berfokus pada peraturan yang menjadi kehendak rakyat melalui badan legislatif kemudian administrasi memiliki fokus dalam pengelolaan peraturan melalui badan eksekutif. Pada ilmu administrasi negara, segala hal perhatian sudah memiliki batasan pada organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran negara dan pemerintahan. Di lain sisi, politik memiliki fokus pada permasalahan negara dan kebijakannya. Untuk mengetahui dimana administrasi negara mampu berdiri di paradigma ini.

B. Paradigma II (1927 - 1937)

Paradigma mempunyai istilah pada administrasi yaitu paradigma sekarang bukanlah sebagai permasalahan utama dalam prinsip administrasi yang sudah diterapkan pada setiap bentuk organisasi dan lingkungan sosial budaya. Saat ini administrasi sudah mempunyai dasar yang jelas dan dapat diterapkan dimanapun.

Administrasi merupakan ilmu yang membutuhkan prinsip. Menurut Gulick dan Urwick difokuskan dalam lokus itu sangat penting. POSDCORB merupakan prinsip dalam manajemen

C. Paradigma III (1950 - 1970)

Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik dalam paradigma ini. Karena dulu Morstein-Mark menantang pelepasan antara politik dan administrasi karena sudah memberikan kritikan. Namun Helbert Simon berpendapat bahwasanya hal itu sudah tidak diterapkan dalam umum. Akibatnya dalam proses ini sudah terjadi upaya untuk mengembalikan kerja sama antara politik dan administrasi. Lokasi paradigma merupakan negara, tetapi fokus yang ada masih tidak jelas karena terdapat kelemahan dalam unsur administrasi publik.

D. Paradigma IV (1956 - 1970)

Paradigma adalah dasar yang terletak pada ilmu administrasi yang sudah diketahui oleh semua. Paradigma mengembangkan prinsip manajemen secara ilmiah dan mendalam. Meskipun tidak terdapat letak yang pasti, karena fase ini hanya memberikan poin utama. Paradigma memiliki fokus pada perilaku organisasi, analisa manajemen, implementasi teknologi kontemporer contohnya, metode kuantitatif, analisis pada sistem dan melakukan kerisetan. Terdapat dua garis besar yang memberikan kemajuan untuk memberikan arahan pada pengembangan ilmu administrasi tanpa adanya ilmu kejiwaan yang mengarahkan pada kebijakan publik. Terdapat kemungkinan bahwa setiap poin utama yang dilakukan pengembangan mampu dilakukan dalam bidang bisnis dan administrasi.

E. Paradigma V (1970 - 1990)

Paradigma mempunyai arti yang sama dalam administrasi publik, karena pemerintah sekarang sudah lebih dari hanya ilmu. Administrasi negara sudah melakukan pengembangan dalam ilmu organisasi, ilmu kebijakan dan ilmu politik. Paradigma sudah memiliki lokasi dan poin penting yang jelas. Poin utama adalah pengembangan ilmu dan fokusnya merupakan permasalahan dan kepentingan masyarakat.

F. Paradigma VI (1990-Sekarang)

Paradigma *governance* sudah lahir pada tahun 1990. (Tamagoya Ikeanyibe,2017) *governance* dapat didefinisikan sebagai upaya pengelolaan dalam menjalankan kepemimpinan atau aturan yang mengikat oleh para pemimpin politik untuk mensejahterakan rakyat dan negara. Hal ini sebagai tahapan yang pasti untuk setiap sektor yang ada pada masyarakat. Karena masyarakat memiliki kekuasaan dan sudah memberikan persetujuan untuk menerbitkan kebijakan publik yang mampu berdampak langsung pada individu dan pemerintah Lembaga. Menurut Peters (Ikeanyibe,2017) paradigma pemerintah dan negara telah memiliki hubungan yang baik karena kedua pihak telah berusaha untuk memecahkan sistem pemerintah yang disiplin dan *top-down* seperti sebelumnya. Peters sudah mengatakan terkait membedakan paradigma negara yang lain.

Menurut Gibson *governance* sebagai tahapan awal untuk menghubungkan kolaborasi untuk melakukan tugas pemerintah. Kolaborasi ini sudah masuk pada penduduk asli dan organisasi juga membantu masyarakat baik daerah, sektor

publik, dan swasta (Ikeanyibe, 2017). Stoker (Ikeanyibe, 2017) telah mengajukan lima proporsi kritis dan dilematis yang sebagian besar telah menjadi prinsip paradigma *governance*, yaitu:

- a) Kolaborasi pemerintah dan pejabat di dalam dan luar pemerintahan
- b) Pengabaian batasan dan kewenangan untuk permasalahan di ekonomi masyarakat
- c) Kecenderungan jabatan dalam pemerintah yang sudah terlibat
- d) Hubungan pejabat pemerintah yang mandiri dan mengatur
- e) Tidak ada ketergantungan kekuasaan untuk negara yang mempunyai kekuasaan dalam menangani dan memberikan solusi dalam permasalahan.

Dalam *governance* ini terdapat beberapa varian seperti *good governance*, *network governance* dan *collaborative governance*. Dalam penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo maka paradigma administrasi publik yang digunakan paradigma ke-6 yaitu *Governance*. Karena Dinas Perhubungan sebagai organisasi publik yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik dengan penuh tanggung jawab dalam strategi pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

1.6.4. Perencanaan Strategis

Proses perencanaan strategis merupakan suatu metode terstruktur untuk merumuskan pernyataan yang jelas tentang posisi suatu organisasi, apa yang dilakukannya, dan mengapa organisasi tersebut melakukannya. Dalam konteks

ini, setiap langkah yang diambil oleh organisasi harus sejalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi tersebut terarah dengan benar. Proses perencanaan strategis bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan evaluasi apakah organisasi mampu mewujudkan tujuan yang sudah disepakati bersama. Menurut Bryson (2001:55), ada delapan tahapan dalam proses perencanaan strategis yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis

Langkah awal melibatkan diskusi dengan para pemangku kepentingan kunci atau pemimpin pendapat, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, mengenai semua upaya perencanaan strategis dan prosedur perencanaan yang signifikan. Tugas pertama adalah secara cermat mengidentifikasi setiap individu yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi anggota individu dalam kelompok, unit, atau organisasi yang perlu terlibat dalam proses perencanaan.

2. Memperjelas mandat organisasi

Mandat organisasi merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum atau sekumpulan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi partisipasi organisasi publik. Dalam konteks perencanaan strategis, pemahaman yang jelas terhadap mandat tersebut sangatlah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Misi merujuk pada tujuan organisasi yang akan direalisasikan melalui program atau bantuan yang tersedia. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memahami hasil dari perkembangan organisasi serta tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi melalui perkembangannya

4. Analisis lingkungan *internal*

Analisis pada lingkungan *internal* bermanfaat untuk melakukan identifikasi pada kekuatan dan kelemahan beserta unsur yang mendukung ataupun menghambat untuk mewujudkan misi dan Amanah organisasi. Analisis lingkungan *internal* mampu dilaksanakan pada setiap aspek berikut:

a) Sumber daya manusia

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*non human resources*). Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik (Sulistiyani dan Rosidah, 2003 :9). Sumber daya non manusia terdiri atas sumber daya alam (*natural resources*), modal, mesin, teknologi, material. SDM dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas mencakup kemampuan fisik maupun non fisik (kecerdasan, mental, skill, pendidikan

dan pengalaman). Sedangkan aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia (Hasibuan, 2000 : 3).

b) Sumber dana/dukungan anggaran

Keban (dalam Fathonah, 2002 :40) menyatakan bahwa kajian terhadap aspek anggaran adalah dengan melihat sejauh mana ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi sekaligus bagaimana optimalisasi penggunaan sumber daya menjadi aspek yang sangat penting. Penyaluran dana kepada sebuah organisasi dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam kelancaran operasional organisasi secara keseluruhan

c) Sarana dan prasarana

Menurut definisi yang ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 880), sarana merujuk pada semua hal yang mampu menggunakan alat atau media dalam mewujudkan suatu tujuan. Sarana biasa dikenal sebagai fasilitas, merupakan komponen yang sangat esensial dalam organisasi untuk memperoleh dukungan dan meningkatkan berbagai aktivitasnya. Tanpa pasokan yang memadai dan berkualitas baik dari makanan dan minuman, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya

5. Analisis lingkungan *eksternal*

Analisis yang kedua dilakukan terhadap lingkungan *eksternal* organisasi. Lingkungan ini dapat berupa peluang yang dimiliki oleh organisasi dan ancaman yang harus dihadapi oleh organisasi. Analisis ini meliputi identifikasi terhadap kecenderungan perkembangan :

a) Aspek politik

Menurut Salusu (1996 : 321), dalam implementasi manajemen strategis, aspek politik yang perlu diperhatikan adalah perubahan peraturan perundang- undangan terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup dan misi organisasi, dengan perhatian tidak hanya pada dimensi lokal tetapi juga tingkat nasional bahkan politik global. Perubahan situasi politik yang terjadi pada setiap daerah selalu memberikan pengaruh pada keberlangsungan organisasi yang ada pada daerah tersebut.

b) Aspek ekonomi

Robinson dan Pearce (1997: 93) menegaskan bahwa terdapat aspek eksternal yang paling penting yaitu ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi, sehingga merujuk pada karakteristik dan orientasi sistem ekonomi terhadap suatu organisasi yang beroperasi

c) Aspek sosial

Menurut Siagian (2000: 73), aspek sosial mencakup gaya hidup, nilai-nilai, dan pola kehidupan masyarakat yang perlu diperhatikan. Pengaruh sosial pada lingkup kemasyarakatan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, oleh karena itu harus dipertimbangkan pada setiap proses pengambilan keputusan.

d) Aspek teknologi

Pearce dan Robinson (1997: 99) menjelaskan bahwa untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan motivasi, organisasi harus aktif memantau perkembangan teknologi. Penyesuaian terhadap kemajuan teknologi akan

meningkatkan peluang untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan kualitas layanan

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Perencanaan itu merupakan masalah yang sangat penting bahwa isu-isu strategis dihadapi dengan cara terbaik dan efektif jika organisasi ingin mempertahankan kelangsungan hidup dan berhasil baik. Organisasi yang mengabaikan isu strategi akan mengalami masalah yang disebabkan oleh ancaman dan peluang.

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda-beda karena tingkat, fungsi dan kerangka waktu.

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan

Langkah terakhir dalam proses perencanaan, organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

1.6.5. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan ilmu yang multidisipliner dalam berbagai hal organisasi dan sudah memiliki jangkauan ilmu yang luas yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Hal tersebut sudah mempunyai fungsi dalam pengembangan SDM, keuangan, sistem informasi dan politik. (Pasolong, 2007;83) Fungsi yang memiliki keterkaitan dalam proses implementasi

manajemen pada organisasi publik. George R Terry telah memberikan empat tugas dalam manajemen utama yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Upaya dalam menentukan tujuan dan proses kegiatan apa yang wajib dilakukan supaya dapat tercapai. Hal ini bisa dituang dalam bentuk deskripsi pemaparan program kerja.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kegiatan dilakukan dengan menetapkan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi dalam bekerja dan kerja sama dalam kegiatan yang dilakukan.

3. Pergerakan (*Actuating*)

Menggerakan organisasi supaya mampu menjalankan sesuai dengan perolehan tugas individu dan mampu menggerakan semua sumber daya pada organisasi sehingga dapat memberikan kepastian bahwa tugas yang dilaksanakan sudah sesuai rencana program dan mencapai tujuan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Sebagai suatu evaluasi pada semua program sehingga dapat mengetahui kelemahan yang terjadi dan segera dikoreksi. Kegiatan yang sudah diberikan evaluasi harus diperhatikan sebagai bahan rekomendasi untuk kegiatan di masa mendatang.

Dari pendapat menurut ahli, bisa disimpulkan bahwasannya manajemen publik sebagai serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang sudah dilakukan sehingga mampu mencapai tujuan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

Manajemen publik memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat sehingga kinerja dari pemerintah mampu memberikan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya manajemen strategis akan terfokus pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Keduanya harus bekerja bersama untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi sektor publik yaitu Dinas Perhubungan.

1.6.6. Manajemen Strategis

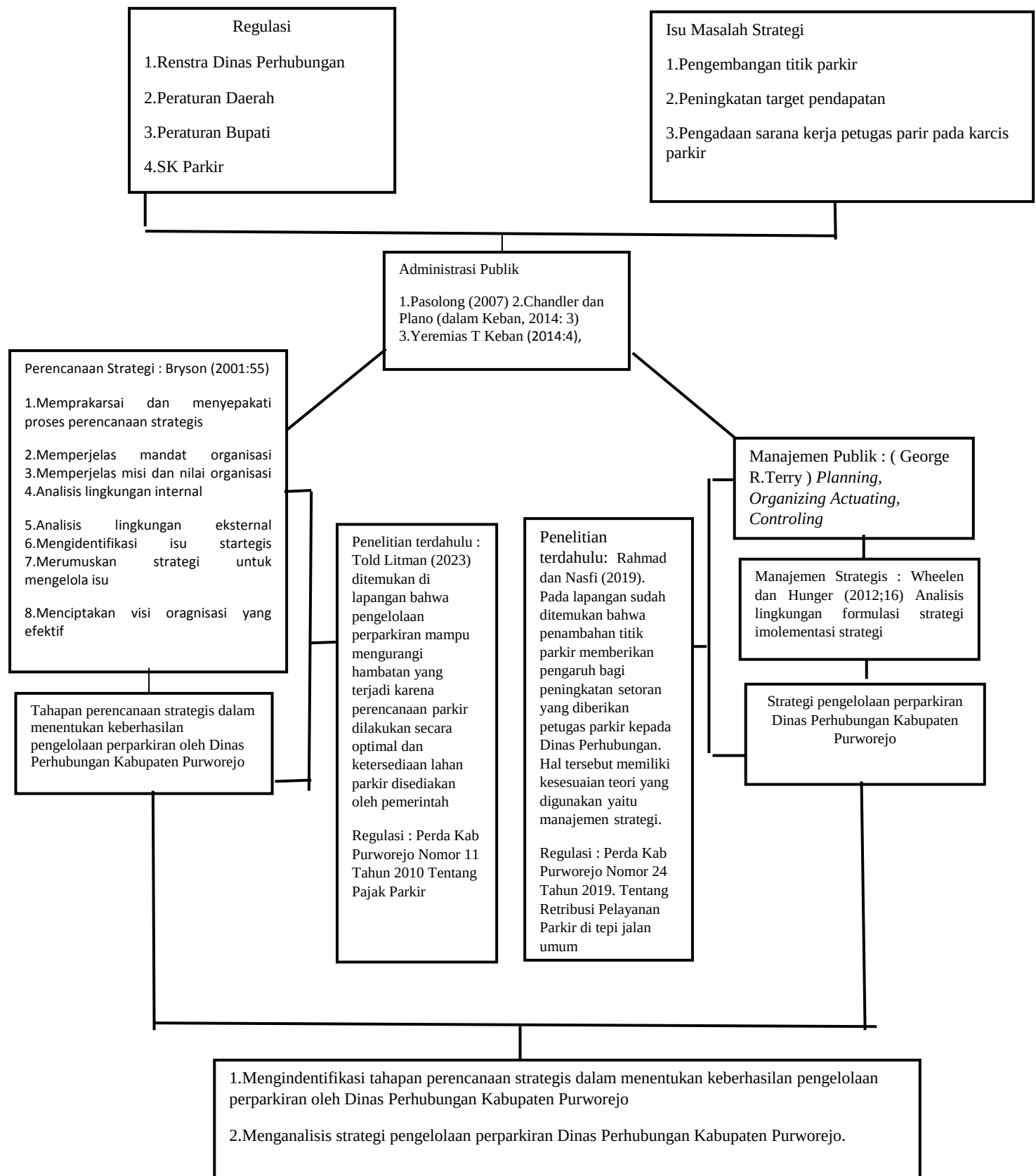
Pearce II dan Robinson (2008) mengemukakan bahwa manajemen strategis merujuk pada serangkaian tindakan dan keputusan yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan rencana guna mencapai tujuan perusahaan. Wheelen dan Hunger (2012: 16) menyoroti bahwa analisis lingkungan, pengembangan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian merupakan elemen-elemen kunci dalam manajemen strategis. Solihin (2012: 64) menjelaskan bahwa manajemen strategis melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap semua putusan dan Tindakan strategis Perusahaan untuk mewujudkan keberhasilan yang maksimal. Sementara itu, menurut Boone, Louis E. Kurtz, dan David L. (2008), analisis SWOT dianggap sebagai instrumen vital dalam perencanaan strategis yang memberikan bantuan untuk melakukan perbandingan pada kekuatan dan kelemahan suatu organisasi untuk melihat bagaimana peluang dan ancaman.

Maka dapat disimpulkan pengertian Manajemen strategis merupakan suatu pola pikir dan cara untuk mengelola suatu organisasi dengan baik dan penuh tanggung

jawab. Manajemen strategis tidak mempunyai batasan dalam melaksanakan rencana kegiatannya dan berfokus pada aspek visi, misi, dan tujuan organisasi.

Untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi, manajemen strategi memastikan pencapaian tujuan dengan maksimal yang dibantu dengan perencanaan strategis untuk membentuk dasar strategi dengan proses dan tahapan, Keterkaitan ini penting dalam mengarahkan organisasi menuju masa depan yang berhasil.

1.7. Kerangka Pemikiran Teoritis



1.8. Operasionalisasi Konsep

1. Tahapan Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah sistematis untuk melibatkan ketetapan tujuan jangka panjang suatu organisasi dalam penentuan strategi dalam mencapai tujuan. Perencanaan strategis membantu organisasi untuk menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, dan mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- a) Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis; Tahapan perencanaan strategis biasanya dimulai dengan prakarsa dan persetujuan dari pimpinan atau manajemen tertinggi organisasi
- b) Memperjelas mandat organisasi : Hak atau wewenang untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan tertentu.
- c) Memperjelas misi dan nilai organisasi: Langkah keperluan organisasi itu menyebabkan terjadinya analisis pemangku kepentingan dan perumusan misi organisasi
- d) Analisis lingkungan *internal* : Analisis pada lingkungan internal bermanfaat untuk melakukan identifikasi pada kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi; sumber daya manusia, sumber dana anggaran, dan sarana prasarana
- e) Analisis lingkungan *eksternal* : untuk mengidentifikasi berbagai faktor dari luar organisasi yang tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan lingkungan kinerja organisasi.

- Politik
- Ekonomi
- Sosial
- Teknologi

- f) Mengidentifikasi isu strategis : mengidentifikasi pertanyaan kebijakan dasar yakni agenda isu strategi yang dihadapi organisasi.
- g) Merumuskan strategi untuk mengelola isu : mewujudkan strategi secara efektif menghubungkan organisasi dengan lingkungannya
- h) Menciptakan visi organisasi yang efektif : organisasi mengembangkan gambaran visi sukses dalam menerapkan strategi yang telah ditetapkan

2. Strategi Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan Kab Purworejo

Strategi pengelolaan perpustakaan melibatkan serangkaian pendekatan dan keputusan yang dirancang untuk mengelola area parkir dengan efisien, meningkatkan ketersediaan, meminimalkan kemacetan. Strategi pengelolaan perpustakaan sebagai alternatif untuk mengukur pencapaian menuju keberhasilan yang ingin dicapai.

1. *Planning* : Tugas organisasi untuk mengatur serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan
2. *Organizing* : Proses ini mencakup pembentukan struktur organisasi, penentuan tugas dan tanggung jawab, peran individu di dalamnya, serta koordinasi antar departemen.
3. *Actuating* : Pemanfaatan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa operasi organisasi berjalan sesuai jadwal kerja dan mengoptimalkan

penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

4. *Controlling* : Melibatkan evaluasi strategi parkir untuk menentukan rekomendasi yang akan digunakan dalam kegiatan mendatang.
5. Analisis lingkungan: Melibatkan penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi bisa dilakukan dengan metode analisis SWOT (Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman).
6. Formulasi strategi: Proses perumusan strategi melibatkan penetapan tujuan dan target organisasi, penguraian strategi, serta penyempurnaan rencana strategis tertentu guna mencapai tujuan tersebut.
7. Implementasi strategi: Bertujuan untuk menjamin pelaksanaan efektif dari semua strategi yang telah dirumuskan sebelumnya untuk pengelolaan taman nasional. Menurut Wheelen dan Hunger (2004), tahap implementasi strategi terdiri dari tiga langkah, yaitu: (1) pengembangan program; (2) penyusunan anggaran; dan (3) pembentukan prosedur
8. Evaluasi dan kontrol : Melibatkan perbandingan antara kinerja aktual dengan target yang diharapkan, serta memberikan umpan balik kritis kepada manajemen untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Tabel 4-Operasionalisasi Konsep

Konsep	Kriteria	Sub-Fenomena	Gejala Penelitian
Strategi Pengelolaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo	Manajemen Publik	<i>Planning</i>	a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan perparkiran b. Upaya program/Kegiatan yang direncanakan dalam pengelolaan perparkiran yang Dinas Perhubungan laksanakan untuk mencapai tujuan
		<i>Organizing</i>	a. Kegiatan/program untuk mengatur pegawai dalam pembagian tugas pengelolaan perparkiran b. Pelaksanaan untuk melakukan pengaturan dalam pengelolaan perparkiran
		<i>Actuating</i>	a. Usaha menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan perparkiran b. Unsur manajemen yang digunakan Dinas Perhubungan dalam pergerakan pengelolaan Perparkiran
		<i>Controlling</i>	a. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran untuk mencapai tujuan b. Pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran
	Manajemen Strategis	Analisis Lingkungan (SWOT)	Pelaksanaan analisis lingkungan dengan penambahan titik parkir dalam pengelolaan perparkiran
		Formulasi Strategi	Proses penyusunan strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan perparkiran

Konsep	Kriteria	Sub-Fenomena	Gejala Penelitian
		Implementasi Strategi	a.Koordinator parkir bersama dinas perhubungan melaksanakan implementasi strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan perparkiran b.Hambatan selalu terjadi dalam proses implementasi pengelolaan perparkiran
		Evaluasi dan Kontrol	Pelaksanaan Evaluasi dan kontrol untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pengelolaan perparkiran
Tahapan Perencanaan Strategis untuk menentukan keberhasilan	Perencanaan Strategis	Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis	Pengambilan keputusan untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses perencanaan strategis
		Memperjelas mandat organisasi	Peraturan sebagai pedoman dalam pengelolaan perparkiran untuk mencapai tujuan
		Memperjelas misi dan nilai organisasi	Misi dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran dengan mempermudah proses setoran keuangan parkir Nilai organisasi berpedoman dalam peraturan
		Analisis lingkungan internal	Sumber Daya Manusia, Sumber anggaran, sarana dan prasarana
		Analisis lingkungan eksternal	Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi
		Mengidentifikasi isu strategis	Upaya pelaksanaan isu strategi yang dihadapi Dinas Perhubungan dengan keberadaan SOP Parkir

Konsep	Kriteria	Sub-Fenomena	Gejala Penelitian
		Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu Memperjelas mandate organisasi	Upaya pelaksanaan perumusan strategi untuk mengelola isu yang terjadi pada petugas parkir untuk mencapai tujuan pengelolaan perparkiran
		Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan	Peningkatan target yang diberikan pemerintah untuk mencapai visi organisasi dalam pengelolaan perparkiran

1.9. Argumen Penelitian

Strategi Pengelolaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo perlu dilakukan karena keberadaan pelanggar parkir yang mengganggu lalu lintas harus segera diberi tindakan, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo harus mempunyai strategi pengelolaan dalam melakukan upaya untuk mencapai keberhasilan dalam strategi pengelolaan parkir untuk mengurangi terjadinya parkir liar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait tahapan perencanaan strategi dan strategi pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan perlu dilakukan untuk mewujudkan kabupaten purworejo yang lebih baik. Karena parkir liar menyebabkan kemacetan yang ditimbulkan oleh oknum pelanggar parkir tentunya menghasilkan keuntungan karena memanfaatkan bahu jalan untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir dan hal itu menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah setempat.

1.10. Metodologi Penelitian

1.10.1. Tipe Penelitian

Pasolong (2012:75) mengungkapkan bahwa desk riset adalah jenis penelitian yang menggambarkan situasi yang terjadi selama proses penelitian; Di dalamnya terdapat dua pendekatan untuk menggambarkan, merangkum, menganalisis, dan menafsirkan kondisi saat ini. Salah satu pendekatan sudah dilakukan pada analisis yaitu studi deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Menurut Rulam Ahmadi (2014:16), berdasarkan data dari Sugiyono, dapat disimpulkan bahwa

penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami keadaan suatu fenomena tanpa melakukan perbandingan atau korelasi dengan variabel lain. Pada penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan dengan memberikan gambaran dan uraian berupa, strategi pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dan apa saja tahapan perencanaan strategis dalam menentukan keberhasilan pengelolaan perpustakaan.

1.10.2. Fenomena Penelitian

1. Tahapan Perencanaan Strategis

Proses perencanaan strategis merupakan suatu pendekatan sistematis untuk merumuskan rencana yang mengklarifikasi dan mengevaluasi identitas organisasi, kegiatan yang dilakukannya, serta tujuan di balik tindakan organisasi tersebut.

A. Perencanaan Strategis

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis: Mendiskusikan rencana tersebut dengan pengambil keputusan utama atau pemimpin opini
2. Memperjelas mandat organisasi: Amanat organisasi adalah apa yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian yang menjadi pilar yuridisme arah strategis organisasi publik
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; misi digunakan untuk memahami sejauh mana suatu organisasi tertentu telah terbentuk serta tujuan yang ingin dicapai organisasi melalui pembentukan tersebut.

4. Analisis lingkungan *internal* : berkaitan dengan daya manusia, dana anggaran dan sarana prasarana
5. Analisis lingkungan *eksternal*: Analisis ini berfokus pada identifikasi faktor yang mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi: Organisasi tidak dapat menangani isu strategis mungkin mengalami konsekuensi berupa keterlambatan dan keterbatasan keuangan.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu : Merumuskan strategi untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapi.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan : Suatu organisasi harus mampu mewujudkan strateginya dan mencapai seluruh tujuan di masa depan

2. Strategi Pengelolaan Perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kab Purworejo

Strategi pengelolaan perpustakaan proses untuk mengukur dan mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan. Dengan melaksanakan strategi pengelolaan perpustakaan yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif.

A. Manajemen Publik

Supaya strategi pengelolaan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar maka dibutuhkan fungsi manajemen menurut George R Terry sebagai berikut :

- a) Perencanaan (*Planning*) ; Tugas organisasi mengatur serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan

- b) Pengorganisasian (*Organizing*): Proses ini mencakup pembentukan struktur organisasi, penentuan tugas dan tanggung jawab, peran individu di dalamnya, serta koordinasi antar departemen.
- c) Pengorganisasian (*Organizing*): Proses ini mencakup pembentukan struktur organisasi, penentuan tugas dan tanggung jawab, peran individu di dalamnya, serta koordinasi antar departemen.
- d) Pergerakan (*Actuating*):. Pemanfaatan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa operasi organisasi berjalan sesuai jadwal kerja dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya diharapkan bisa mewujudkan tujuan dan target organisasi.
- e) Pengawasan (*Controlling*): Melibatkan perbandingan antara kinerja aktual dengan target yang diharapkan, serta memberikan umpan balik kritis kepada manajemen untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

B. Manajemen Strategis

- Analisis lingkungan dengan analisis SWOT(*strength, opportunities, weaknesses, threats*)
- Formulasi strategi: proses penyusunan langkah strategi pengelolaan perpajakan
- Implementasi strategi: Menurut Wheelen dan Hunger (2004) Implementasi strategi meliputi program, anggaran, dan prosedur
- Evaluasi dan kontrol: membandingkan kinerja dengan target yang diharapkan

Tabel 5-Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
1. Strategi Pengelolaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kab Purworejo	1.1 Perencanaan dalam pengelolaan perparkiran	a.Pelaksanaan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan perparkiran b.Upaya program/Kegiatan yang direncanakan dalam pengelolaan perparkiran yang Dinas Perhubungan laksanakan untuk mencapai tujuan	1.Apa saja strategi perencanaan dalam pengelolaan perparkiran ? Jawaban: pada perencanaan pengelolaan perparkiran, strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Purworejo dengan menentukan target yang bekerja sama dengan akademisi kemudian dilakukan survey untuk pengembangan titik parkir baru 2.Siapa stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan perparkiran? Jawaban: Dinas perhubungan yang bekerja sama dengan stakeholder, seperti akademisi dan masyarakat 3. Kapan perencanaan pengelolaan perparkiran dilaksanakan? Jawaban: Setiap lima tahun selalu dilakukan pengembangan titik baru dengan akademisi 4.Mengapa kegiatan perencanaan dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: Kegiatan perencanaan dalam pengelolaan perparkiran perlu dilakukan kerja sama dengan stakeholder supaya masyarakat percaya bahwa dalam penentuan target tidak direayasa oleh Dinas Perhubungan sendiri namun juga terdapat keterlibatan semua pihak. 5.Bagaimana proses kegiatan perencanaan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Proses kegiatan dimulai dengan penentuan target dan pengembangan titik parkir melalui kajian dan survei untuk menghitung potensi di masing-masing titik.Berdasarkan survei tersebut diperoleh potensi untuk menentukan target. Kajian dari akademisi tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan masyarakat akan percaya	1.Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2.Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3.Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4.Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	1.2 Pengorganisasian dalam pengelolaan perparkiran	a.Kegiatan/program untuk mengatur pegawai dalam pembagian tugas pengelola perparkiran b. Pelaksanaan untuk melakukan pengaturan dalam pengelolaan perparkiran	1.Apa saja strategi pengorganisasian dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: suatu proses untuk mengatur tugas setiap pegawai agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Hal tersebut dilakukan dengan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Petugas Parkir yang dilakukan secara dua arah karena dengan adanya koordinasi berdampak pada jumlah setoran yang petugas parkir berikan. 2. Siapa yang melakukan pengaturan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Pengaturan untuk pengelolaan perparkiran dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan dan Petugas Parkir	1.Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2.Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan

			3. Kapan koordinasi pengorganisasian tersebut dilaksanakan? Jawaban : Koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Petugas Parkir dilakukan setiap minggu 4. Mengapa kegiatan koordinasi dalam pengelolaan perparkiran dilaksanakan? Jawaban : Koordinasi tersebut perlu dilaksanakan untuk melangsungkan komunikasi secara dua arah karena dengan koordinasi yang baik petugas parkir merasa dihargai dan tidak diabaikan 5. Bagaimana pengaturan dalam pembagian tugas pengelolaan perparkiran? Jawaban : Petugas parkir dalam melaksanakan pekerjaannya selalu berkeluh kesah dengan Dinas Perhubungan. Keluh kesah tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dialami kemudian dengan adanya koordinasi tersebut Dinas Perhubungan mengetahui dan berusaha untuk menyelesaikan dan mendengarkan permasalahan	Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	1.3 Pergerakan dalam pengelolaan perparkiran	a. Usaha menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan perparkiran b. Unsur manajemen yang digunakan Dinas Perhubungan dalam pergerakan pengelolaan Perparkiran	1. Apa saja strategi pergerakan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban : Pergerakan sebagai suatu usaha untuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Pengelolaan perparkiran harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas baik dari pegawai 2. Siapa yang terlibat dalam pergerakan pengelolaan perparkiran? Jawaban : Pegawai Dinas Perhubungan dan Petugas Parkir yang bekerja sama dengan tim Kepolisian dan Satpol PP 3. Kapan pembinaan dilaksanakan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban : Pembinaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali 4. Dimana pembinaan tersebut dilaksanakan? Jawaban : Pembinaan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan dan di Lapangan dengan melaksanakan monitor secara berkala 5. Mengapa dinas perhubungan menggunakan metode pembinaan dalam menggerakkan sumber daya? Jawaban: Metode pembinaan digunakan karena kualitas yang dimiliki petugas parkir masih rendah yang disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Etika yang dimiliki oleh petugas parkir juga masih tidak patuh dan sering melanggar.	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo

			6. Bagaimana dinas perhubungan menggerakkan sumber daya manusia dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban : Dinas Perhubungan melakukan pembinaan yang dibersamai oleh Tim Kepolisian dan Satpol PP supaya petugas parkir bisa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Perhubungan juga memiliki beberapa program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari petugas parkir.	
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	1.4 Pengawasan dalam pengelolaan perparkiran	a. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran untuk mencapai tujuan b. Pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran	1. Apa saja strategi pengawasan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Strategi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Strategi pengawasan pengelolaan perparkiran tersebut dilakukan untuk memberikan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dan bahan rekomendasi kegiatan yang akan datang. 2. Siapa yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan perparkiran? Jawaban: Pengawasan secara langsung dan tidak langsung dilakukan oleh Masyarakat, petugas parkir, dan Dinas Perhubungan melalui media sosial 3. Kapan pengawasan dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: Pengawasan oleh Dinas Perhubungan selalu dipantau dengan memonitor secara berkala setiap minggu 4. Mengapa dinas perhubungan melaksanakan pengawasan secara dua arah dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban : Pengawasan secara dua arah sangat diperlukan karena masih banyaknya petugas parkir yang tidak jujur dalam pendapatan per-harinya sehingga untuk memastikan hal tersebut dari Dinas Perhubungan melakukan pengecekan di lapangan. Penurunan pendapatan juga disebabkan oleh beberapa faktor diluar kendali petugas parkir seperti hujan, perbaikan trotoar dan <i>drainase</i> sehingga pengguna jasa parkir menurun dan pendapatan berkurang 5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan Dinas Perhubungan? Jawaban : Pelaksanaan pengawasan langsung dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Koordinator parkir dengan terjun langsung ke lapangan untuk monitoring dan pembinaan.	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	1.5 Analisis Lingkungan dalam pengelolaan perparkiran	Pelaksanaan analisis lingkungan dengan penambahan titik parkir dalam pengelolaan perparkiran	1.Apa saja analisis lingkungan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban : analisis lingkungan dalam pengelolaan perparkiran dilakukan dengan strategi pengelolaan perparkiran untuk penambahan titik parkir resmi. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan mencapai tujuan organisasi dalam peningkatan target. 2.Kapan analisis lingkungan dalam pengelolaan perparkiran dilaksanakan? Jawaban: Setiap satu tahun sekali selalu dilakukan penambahan titik parkir resmi untuk mengurangi parkir ilegal 4.Dimana analisis lingkungan dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban : Kabupaten Purworejo terdapat dua penanganan yaitu parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus di luar badan jalan 5.Mengapa analisis lingkungan dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: Analisis lingkungan dilakukan karena perhatian dalam lokasi titik parkir sangat mempengaruhi pada target pendapatan. Sehingga diperlukan cara untuk mengoptimalkan titik yang sudah ada tidak terjadi pungutan liar. 6.Bagaimana analisis lingkungan dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: Penambahan titik parkir baru dibagi menjadi beberapa rayon di purworejo dengan berbagai macam area parkir yang sudah terdapat petugas parkir, dengan begitu strategi pengelolaan perparkiran menjadi lebih optimal.	1.Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2.Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3.Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4.Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	1.6 Formulasi Strategi dalam pengelolaan perparkiran	Proses penyusunan strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan perparkiran	1.Apa saja formulasi strategi dalam pengelolaan perparkiran ? Jawaban : Dalam pengelolaan perparkiran formulasi strategi dilakukan dengan mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan, mengembangkan lokasi titik parkir, sosialisasi pelayanan parkir dan koordinasi untuk membangun visi dan misi organisasi. 2.Kapan penyusunan strategi dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: Menjelang akhir tahun dan awal tahun petugas parkir selalu diundang oleh Dinas Perhubungan untuk koordinasi dalam kinerjanya	1.Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2.Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo

			3. Mengapa formulasi strategi dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: Formulasi strategi dilakukan untuk membangun visi dan misi sehingga diperlukan banyak strategi untuk memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan aturan dan etika. Pelayanan Masyarakat melalui aplikasi e-retribusi sebenarnya sudah tersedia namun masyarakat masih dominan secara manual 4 Bagaimana proses penyusunan strategi dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Proses penyusunan strategi dimulai dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan aturan dan etika. Selain itu Dinas Perhubungan sudah memberikan fasilitas parkir lengkap dengan atributnya supaya bisa membedakan petugas parkir yang resmi dan liar.	Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	1.7 Implementasi Strategi dalam pengelolaan perparkiran	Koordinator parkir bersama dinas perhubungan melaksanakan implementasi strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan perparkiran Hambatan selalu terjadi dalam proses implementasi pengelolaan perparkiran	1. Apa saja tujuan implementasi strategi dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Implementasi strategi dalam pengelolaan perparkiran bertujuan untuk menetapkan prioritas yang jelas sehingga mampu menghindari hambatan yang terjadi. Dalam pengelolaan perparkiran terdapat hambatan yang dialami oleh Dinas Perhubungan seperti permasalahan pada petugas parkir yang masih memiliki sumber daya sosial-ekonomi yang rendah sehingga dalam pelaksanaan di lapangan dibantu oleh koordinator parkir. 2. Siapa yang terlibat dalam implementasi strategi pengelolaan perparkiran? Jawaban: Pelaksanaan implementasi strategi dilakukan bersama Dinas Perhubungan, petugas parkir, dan Koordinator parkir. 3. Kapan implementasi strategi dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: Setiap hari selalu dilaksanakan pemantauan untuk setoran dari Dinas Perhubungan melalui Hp dan Koordinator Parkir 4. Mengapa koordinator parkir membantu dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Koordinator parkir membantu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, karena koordinator parkir dapat membuat id billing yang terintegrasi langsung di Bank Jateng sehingga untuk setoran setiap hari selalu terstruktur 5. Bagaimana koordinator parkir melakukan pekerjaannya dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Koordinator parkir dan Dinas Perhubungan melakukan pemantauan melalui HP dan aplikasi sehingga meskipun tidak turun lapangan setiap saat bisa melakukan evaluasi secara berkala	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	1.8 Evaluasi dan Kontrol dalam pengelolaan perparkiran	Pelaksanaan Evaluasi dan kontrol untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pengelolaan perparkiran	1.Apa saja tujuan evaluasi dan kontrol dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: membantu dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran dan memastikan bahwa strategi pengelolaan perparkiran berjalan sesuai rencana. 2.Siapa yang terlibat dalam evaluasi dan kontrol pengelolaan perparkiran? Jawaban: Dinas Perhubungan terlibat dalam evaluasi dan kontrol secara langsung dan online dalam pengelolaan perparkiran 3.Kapan evaluasi dan kontrol dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: setiap 1 minggu sekali atau 3 hari untuk evaluasi 4.Mengapa evaluasi dan kontrol dalam pengelolaan perparkiran dilakukan? Jawaban: Karena untuk menghindari adanya permasalahan yang terjadi secara berulang dan permasalahan tersebut biasanya mengenai setoran 5.Bagaimana evaluasi dan kontrol? dalam pengelolaan perparkiran dilakukan Jawaban: Pelaksanaan evaluasi dan kontrol dilakukan secara cepat dan segera ditangani oleh Dinas Perhubungan untuk menemukan dan mengatasi permasalahan yang ada di lokasi parkir	1.Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2.Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3.Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4.Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
2.Tahapan Perencanaan Strategis	2.1 Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis	Pengambilan keputusan untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses perencanaan strategis	1. Apa yang dimaksud memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis? Jawaban: Sebagai tujuan langkah pertama untuk menegosiasikan kesepakatan dengan cara pengambilan keputusan yang melibatkan serangkaian langkah dan aktivitas pihak yang terkait. Pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah dan Masyarakat. 2.Siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan strategis? Jawaban: Pengambilan keputusan melalui koordinasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. 3.Kapan dilaksanakan pengambilan keputusan? Jawaban: setiap 1 minggu sekali atau 3 hari untuk evaluasi	1.Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2.Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3.Beberapa orang

			5. Mengapa dilaksanakan pengambilan keputusan? Jawaban: Pengambilan keputusan sebagai tujuan untuk memperoleh kesepakatan antara pemerintah dan Masyarakat sehingga pengelolaan perpustakaan dapat berjalan secara maksimal 6. Bagaimana Pengambilan keputusan dalam proses perencanaan strategis? Jawaban: Meskipun Dinas Perhubungan masih kurang dalam sumber daya manusianya namun dengan pengambilan keputusan itu memerlukan evaluasi dan kontrol yang mengacu pada peraturan yang ada	juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	2.2 Memperjelas mandat organisasi	Peraturan sebagai pedoman dalam pengelolaan perpustakaan untuk mencapai tujuan	1. Apa yang dimaksud mandat organisasi? Jawaban: Sebagai suatu undang-undang yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan organisasi publik. Peraturan dan standar operasional prosedur dijadikan pedoman dalam pengelolaan perpustakaan 2. Siapa yang melaksanakan mandat organisasi dalam perencanaan strategis? Jawaban: Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 3. Dimana peraturan penyelenggaraan parkir berada? Jawaban: Peraturan Dasar Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir 5. Mengapa mandat organisasi penting untuk pengelolaan perpustakaan? Jawaban: Mandat organisasi sangat penting untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena peraturan yang sudah dibuat sesuai dengan koridor Peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur tentang pelayanan parkir di Kabupaten Purworejo 6. Bagaimana pelaksanaan mandat organisasi yang berada pada peraturan? Jawaban: Dalam pelaksanaan Peraturan daerah menggunakan turunan dari peraturan bupati. Peraturan dasar penyelenggaraan retribusi parkir tahun 2023 akhir sedang pembahasan finalisasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di DPRD.	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	2.3 Memperjelas misi dan nilai organisasi	Misi dinas perhubungan dalam pengelolaan perpajakan dengan mempermudah proses setoran keuangan parkir Nilai organisasi berpedoman dalam peraturan	1. Apa yang dimaksud misi dan nilai organisasi? Jawaban: Misi sebagai tujuan organisasi yang akan diwujudkan dalam bentuk program dan nilai-nilai organisasi. Dinas Perhubungan memiliki program yang sudah sesuai dengan misi dan nilai, karena selalu berpegang terhadap aturan yang ada yaitu Peraturan daerah dan Peraturan bupati. 2. Siapa yang menjadi acuan dalam menjalankan misi dan nilai organisasi? Jawaban: Peraturan bupati tentang pemungutan retribusi parkir 3. Kapan uang hasil parkir disetorkan? Jawaban: Penyerahan keuangan hasil parkir disetorkan setiap hari melalui Bank Jateng 4. Mengapa setoran keuangan tidak diserahkan langsung kepada Dinas Perhubungan? Jawaban: Karena Dinas Perhubungan sudah tidak menerima uang langsung dari petugas parkir, hal tersebut untuk menghindari adanya korupsi karena segala hal mengenai keuangan sudah terbuka secara umum 6. Bagaimana proses penyerahan uang hasil parkir? Jawaban: Keuangan hasil parkir dari petugas parkir diserahkan kepada koordinator parkir yang nantinya akan diserahkan langsung ke Bank Jateng. Sehingga pendapatan yang diperoleh dapat dilihat dan itu sudah terbuka.	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	2.4 Analisis Lingkungan Internal	Pelaksanaan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan perpajakan	1. Apa saja sumber daya manusia dalam analisis lingkungan internal? Jawaban: anggota dalam organisasi yang memiliki peran dan fungsi, yang menangani perpajakan masih terbatas terdapat satu kepala bidang dan 1 kepala seksi perpajakan. 2. Siapa kabid dan kasi Perpajakan Dinas Perhubungan Kab Purworejo? Jawaban: Bapak Wahyudi selaku Kabid Perpajakan dan Bapak Ohkta selaku Kasi Perpajakan 3. Kapan pelatihan pegawai yang dimiliki Dinas Perhubungan ? Jawaban: Pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia selalu diupayakan satu tahun 1-2 kali	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di

			4. Mengapa sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan belum maksimal? Jawaban: Kuantitas pegawai yang dimiliki Dinas Perhubungan masih terbatas karena menangani 150an petugas parkir di Kabupaten Purworejo 6. Bagaimana mengatasi sumber daya manusia yang belum maksimal? Jawaban: sekarang terdapat system yang membantu dalam pengelolaan perparkiran sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak perlu banyak yang penting kualitas dari sumber daya manusia lebih ditingkatkan.	Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
		Pelaksanaan sumber dana anggaran dalam pengelolaan perparkiran untuk mencapai tujuan Anggaran operasional sebagai sumber dana anggaran utama dinas perhubungan untuk pengelolaan perparkiran	1. Apa saja sumber dana anggaran dalam analisis lingkungan internal? Jawaban: Anggaran dalam pengelolaan perparkiran yang dikelola adalah anggaran operasional. 2. Kapan anggaran operasional terealisasi? Jawaban: Anggaran Operasional biasa dilakukan setiap satu tahun sekali dengan rincian yang lengkap 3. Dimana penggunaan anggaran operasional? Jawaban: Anggaran operasional habis untuk kebutuhan parkir, seperti anggaran cetak karcis, fasilitas petugas parkir, dan upah kerja petugas parkir. 4. Mengapa anggaran operasional habis untuk kebutuhan fasilitas parkir? Jawaban: Karena untuk cetak karcis itu sebagai poin utama, dan sistem upah pada petugas parkir berdasarkan setorannya	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
		sarana dan prasarana dalam pengelolaan perparkiran untuk mencapai tujuan	1. Apa yang dimaksud sarana dan prasarana dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Sarana dan Prasarana memiliki artian yang berbeda, sarana diartikan sebagai media untuk mencapai tujuan sedangkan prasarana merujuk pada aktivitas yang mendukung. Sarana dan prasarana memang mempunyai makna yang berbeda namun keduanya saling berkaitan 2. Siapa yang mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana? Jawaban: Sarana dan Prasarana diberikan kepada Petugas Parkir dan Masyarakat	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan

			3. Mengapa Sarana dan prasarana diberikan? Jawaban: Sarana dan prasarana yang sudah diberikan kepada petugas parkir dan Masyarakat terkadang tidak dimanfaatkan secara maksimal, seperti petugas parkir sudah diberikan karcis namun tidak diserahkan pada pengguna jasa layanan parkir. Kemudian Masyarakat sudah disediakan tempat parkir namun masih parkir di jalan trotoar untuk pejalan kaki. 4. Bagaimana sarana dan prasarana petugas parkir? Jawaban: Sarana dan prasarana petugas parkir berupa karcis, plang parkir, rompi, peluit, dan stick lampu. Kemudian sarana prasarana yang diberikan kepada masyarakat tempat parkir dan lahan parkir yang memadai.	Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	2.5 Analisis Lingkungan Eksternal	Situasi politik memberikan pengaruh dalam pengelolaan perparkiran	1. Apa saja Faktor Politik dalam pengelolaan Perparkiran? Jawaban: Faktor politik dalam pengelolaan perparkiran memiliki pengaruh yang penting terutama dalam kebijakan pemerintah. Pengaruh politik dalam pengelolaan perparkiran berkaitan langsung dengan penyusunan peraturan yang menjadi pedoman. 2. Siapa yang terlibat dalam penyusunan peraturan pengelolaan perparkiran? Jawaban: Penyusunan melibatkan Bupati, Kepala Dinas, DPRD, dan sub-bagian perparkiran 3. Kapan masa berlaku peraturan yang sudah disahkan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Peraturan memiliki masa berlaku yang berbeda namun setiap tahun peraturan di kaji ulang untuk menyesuaikan dalam kebutuhan 4. Mengapa situasi politik diperhatikan dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Situasi politik selalu berkaitan dengan isu kebijakan sehingga pemerintah harus respon berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dalam perparkiran 5. Bagaimana upaya petugas parkir dalam perubahan situasi politik? Jawaban: Petugas parkir sebagai pelayanan parkir tidak berpengaruh terhadap faktor politik, untuk peraturan yang dijadikan landasan petugas parkir bisa mengalami perubahan sesuai dengan situasi politik yang terjadi	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
		Kegiatan/Program Dinas Perhubungan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi petugas parkir	1.Apa saja faktor ekonomi dalam pengelolaan Perparkiran? Jawaban: Pengaruh ekonomi dalam pengelolaan perparkiran mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi petugas parkir dan pemerintah mampu mencapai target dalam peningkatan retribusi. 2.Mengapa pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk petugas parkir? Jawaban: Petugas parkir dalam menjalankan tugasnya diberi gaji oleh Dinas Perhubungan, secara langsung pemerintah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mampu memberikan pengaruh ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup 3.Bagaimana dengan keberadaan petugas parkir dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Pemerintah dengan adanya petugas parkir sangat membantu dalam pengelolaan perparkiran, karena pendapatan daerah melalui retribusi parkir menjadi meningkat.	1.Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2.Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3.Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4.Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
		Pelaksanaan sosialisasi dari Dinas Perhubungan kepada Masyarakat untuk menggunakan transportasi publik	1.Apa Faktor sosial dalam pengelolaan Perparkiran? Jawaban: Faktor sosial dalam pengelolaan perparkiran berkaitan langsung dengan Masyarakat. Karena dalam membangaun keberhasilan pengelolaan perparkiran. Dinas Perhubungan juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi publik agar mengurangi kemacetan. 2.Kapan Masyarakat mulai menggunakan transportasi publik? Jawaban: Tahun 2024 pemerintah sudah mulai mengenjot penggunaan transportasi publik, supaya sering digunakan Masyarakat 3.Mengapa Masyarakat harus beralih ke transportasi publik Jawaban: Dengan beralihnya Masyarakat ke transportasi publik akan mengurangi arus kendaraan yang menimbulkan kemacetan. Karena Masyarakat itu banyak dan Dinas Perhubungan tidak sepenuhnya bisa mengatur, sehingga perlu dilaksanakan secara perlahan	1.Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2.Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3.Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4.Masyarakat Kabupaten Purworejo

			4. Bagaimana penggunaan transportasi publik supaya berjalan secara maksimal Jawaban: Masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk mengutamakan transportasi publik, karena kebutuhan tempat parkir semakin padat dan sistem transportasi dapat diintegrasikan secara maksimal	
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
		Pelaksanaan E-Parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan perparkiran untuk mencapai tujuan	1. Apa saja faktor teknologi dalam pengelolaan Perparkiran? Jawaban: Faktor teknologi dalam pengelolaan perparkiran mampu memberikan pelayanan yang baru, karena inovasi menjadi elemen penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Sistem parkir elektronik sudah dilaksanakan namun belum maksimal. 2. Kapan sistem teknologi parkir berlaku? Jawaban: Tahun 2023 sistem E-Parkir sudah bisa digunakan 3. Mengapa E-Parkir belum digunakan secara maksimal dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: E-Parkir belum digunakan secara maksimal karena masih dalam tahap penyempurnaan 4. Bagaimana pemanfaatan E-Parkir dalam pengelolaan perparkiran? Jawaban: Parkir Elektronik bisa digunakan namun belum sepenuhnya karena saat ini masih menggunakan sistem <i>cashless</i>	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	2.6 Mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi organisasi	Upaya pelaksanaan isu strategi yang dihadapi Dinas Perhubungan dengan keberadaan SOP Parkir	1. Apa yang dimaksud mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi organisasi? Jawaban: isu strategi yang dihadapi organisasi adalah masalah atau tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga diperlukannya SOP dan peraturan yang mengikat 2. Siapa isu strategi yang dihadapi organisasi? Jawaban: Standar Operasional Prosedur perpustakaan 3. Kapan SOP Parkir digunakan? Jawaban: Pada saat pembayaran retribusi parkir secara tunai dan non tunai 4. Mengapa Pengelolaan Perpustakaan tidak lepas dari SOP? Jawaban: Dengan adanya SOP Parkir dalam pelaksanaan tugas tidak akan lepas karena terdapat peraturan dan undang-undang yang berlaku	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo

			5. Bagaimana keberadaan SOP dalam pengelolaan perpustakaan? Jawaban: Keberadaan Standar Operasional Prosedur tidak boleh melanggar dari peraturan yang ada	4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	2.7 Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu	Upaya pelaksanaan perumusan strategi untuk mengelola isu yang terjadi pada petugas parkir untuk mencapai tujuan pengelolaan perpustakaan	1. Apa yang dimaksud merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu? Jawaban: merumuskan strategi untuk mengelola isu dapat dilakukan supaya permasalahan tidak terjadi. Permasalahan yang sering terjadi masih seputar petugas parkir. Karena petugas parkir masih sering melanggar. 2. Kapan pelaksanaan perumusan strategi dinas perhubungan kepada petugas parkir? Jawaban: Setiap akhir tahun selalu dilakukan lamaran pekerjaan Kembali bagi petugas parkir 3. Mengapa petugas parkir tidak boleh melibatkan preman dalam pengelolaan perpustakaan? Jawaban: Petugas parkir bekerja dengan Dinas Perhubungan jadi tidak diperbolehkan untuk pihak lain ikut campur seperti preman lapangan 4. Bagaimana menyelesaikan permasalahan preman lapangan yang meminta jatah uang parkir? Jawaban: Karena preman lapangan sering memalak petugas parkir untuk meminta pajak, dan tak sedikit petugas parkir yang memberikan dan mengeluh maka Dinas Perhubungan perlu melakukan peringatan secara lisan dan tertulis	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo
Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Pertanyaan	Informan
	2.8 Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan	Peningkatan target yang diberikan pemerintah untuk mencapai visi organisasi dalam pengelolaan perpustakaan	1. Apa yang dimaksud visi organisasi yang efektif untuk masa depan? Jawaban: organisasi berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya karena visi sebagai gambaran yang jelas dan inspiratif untuk masa depan. Visi Dinas Perhubungan selalu meningkatkan dalam target. 2. Kapan realisasi pendapatan tercapai? Jawaban: Realisasi pendapatan sudah mencapai 6.1 M 3. Mengapa pemerintah memberikan target yang tinggi? Jawaban: Target yang diberikan pemerintah terbilang tinggi se-jawa Tengah dengan kondisi Kabupaten yang masih kecil, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan visi organisasi yang efektif 4. Bagaimana keterkaitan target yang tinggi dengan pendapatan ? Jawaban: Keterkaitan yang baik karena dengan target yang tinggi, pendapatan yang diperoleh juga meningkat	1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 2. Kepala Seksi Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo 3. Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo 4. Masyarakat Kabupaten Purworejo

1.10.3. Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan lokasi di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang krusial dalam penelitian kualitatif karena menetapkan tempat penelitian berarti menentukan objek dan tujuan penelitian, yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menjalankan penelitian. Dalam memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di area perparkiran dan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Fokus penelitian penting untuk membatasi mengenai objek penelitian dan peneliti tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada strategi pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

1.10.4. Subjek Penelitian

Peneliti menerapkan metode *purposive* dalam pengumpulan data untuk studi ini, dengan menitikberatkan pada subjek yang relevan dengan maksud atau tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:61), *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang dapat menyediakan data primer dan sekunder serta memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan penelitian. Fokus dari penelitian ini akan berpusat pada:

- a) Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- b) Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- c) Beberapa orang juru parkir di Kabupaten Purworejo
- d) Masyarakat Kabupaten Purworejo

1.10.5. Jenis Data

Menurut Rulam Ahmadi (2014:108), yang mengutip Patton, "apa yang diucapkan oleh orang adalah data kualitatif primer." Ini berarti bahwa "apa yang diucapkan oleh orang adalah apa yang diperoleh secara lisan melalui wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen atau survei." Patton juga menyatakan bahwa data kualitatif mencakup informasi dari wawancara dengan individu yang menggambarkan situasi, peristiwa, dan interaksi. Neuman (2000:148), seperti yang disebutkan oleh Rulam Ahmadi (2014:108), juga mengungkapkan bahwa data kualitatif melibatkan kata-kata, termasuk kutipan langsung atau deskripsi khusus tentang peristiwa sejarah. Data kualitatif adalah informasi dalam bentuk teks, kata-kata tertulis, frasa, atau simbol yang menggambarkan dan menjelaskan individu dengan karakteristik dan pengalaman dalam kehidupan sosial mereka.

- a) Kata-kata dan Tindakan dalam bentuk wawancara dan kesan atau pernyataan dari orang yang berkaitan. Kata dan Tindakan dalam bentuk wawancara sehingga informasi tersebut dapat direkam melalui berbagai media, seperti rekaman video, kaset otomatis, pengambilan foto atau film, atau melalui catatan tertulis.
- b) Sumber tertulis dalam bentuk buku, arsip, survei, dokumen resmi dan dokumen pribadi

1.10.6. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015:156) bahwa pengumpulan menggunakan 2 sumber data:

- a) Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan dan dinilai secara langsung oleh individu dengan menggunakan narasumber yang dapat dipercaya dalam penelitian ini, yaitu kepala bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Kepala seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Juru Parkir Kabupaten Purworejo, Masyarakat Kabupaten Purworejo. Karakteristik Narasumber meliputi :
 - Kepala Bidang pegawai Dinas Perhubungan yang membidangi pengelolaan perparkiran di Kabupaten Purworejo Periode 2023
 - Kepala Seksi Perparkiran pegawai Dinas Perhubungan yang membidangi secara operasional dalam perparkiran di Kabupaten Purworejo Periode 2023
 - Petugas Parkir di Kabupaten Purworejo yang menjalankan tugas pengelolaan parkir, mulai dari penataan kendaraan
 - Masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam penggunaan jasa parkir di Kabupaten Purworejo
- b) Data Sekunder adalah informasi yang telah ada dalam bentuk yang telah diverifikasi oleh pihak lain. Secara umum, data publik atau sumber data yang diperoleh melalui metode penelitian non-linier seperti buku, artikel, jurnal, dan situs web yang relevan dengan penelitian jangka panjang telah tersedia.

1.10.7. Instrumen Penelitian

Menurut Jamaludiin Ahmad (2015:161) dengan mengutip pendapat dari Arikunto menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang krusial dan strategis yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam analisis kualitatif, instrumen yang paling penting adalah:

- a) Peneliti yang merupakan “*key*” instrument
- b) Pedoman wawancara (*interview guide*)
- c) Alat bantu berupa dokumen,*tape recorder*,lembar catatan dan dokumen

1.10.8. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan pengumpulan data yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

- a) Observasi

Sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2015: 226) yang merujuk pada pengamatan Marshall, peneliti memahami subjek dan maknanya melalui observasi. Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data secara diam-diam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

- b) Wawancara

Menurut Esterberg (2002), sebagaimana disebutkan oleh Sugiyono (2015: 231), wawancara merupakan interaksi berbagai individu untuk berbagi informasi melalui pertanyaan dan memungkinkan konstruksi makna dalam topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara non-struktural atau yang juga dikenal sebagai non-direktif.

c) Dokumentasi

Sugiyono (2015: 240), hasil penelitian observasional atau wawancara mungkin menjadi lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila berdasarkan pada pengalaman pribadi sehari-hari, baik itu di lingkungan anak usia dini, di sekolah, di tempat kerja, di komunitas, maupun melalui otobiografi. Dokumen yang relevan untuk penelitian ini dapat berupa teks, gambar, atau kutipan penting dari individu yang terkait.

1.10.9. Teknik Analisis Data

Menurut pedoman dalam literatur yang mengikuti metodologi penelitian kualitatif (2014: 229), mengacu pada temuan Neuman, analisis data merupakan jenis analisis yang melibatkan pengenalan pola dalam data, seperti pola kemunculan atau obsesi. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman (1992: 1–21) sebagaimana dipaparkan oleh Hamid Patilima (2005:98), dalam analisis kualitatif, data yang baru dikumpulkan bersandar pada kategorisasi, bukan pada rentang. Data tersebut mungkin dikumpulkan melalui metode yang berbeda, seperti wawancara. Berikut adalah jenis aktivitas yang secara konsisten terjadi dalam analisis data yang diuraikan oleh Miles dan Huberman:

a) Reduksi data

Reduksi data digunakan dalam mengenali, mengukur minat, dan mengurangi kebocoran data yang ada. Proses pengurangan data dilakukan secara berulang selama proses mengumpulkan data. Reduksi data melibatkan mengidentifikasi, memperluas, menghapus informasi yang

tidak dibutuhkan dan mengatur data sebaik mungkin sehingga memungkinkan untuk melakukan diferensiasi dan analisis.

b) Penyajian data

Penyajian data merujuk pada kumpulan informasi yang tidak terstruktur yang dapat digunakan untuk proses penyajian data dan analisis sentimen. Salah satu strategi kognitif untuk mengubah informasi yang lengkap dijadikan format yang sederhana dan memiliki kemudahan untuk dipahami, baik melalui penyajian yang terpilih maupun dengan struktur yang terorganisir dengan baik

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir pada kegiatan analisa kualitatif. Kesimpulan terakhir bergantung oleh seberapa besar kumpulan catatan yang dikumpulkan di lapangan, pengkodean, penyimpanan.

d) Analisis Data ATLAS.ti

Atlas.ti digunakan untuk melakukan penyimpulan data yang terorganisir, sistematis, efektif, dan efisien. *Software* Atlas.ti dapat membuat data menjadi mudah dipindahkan, dan memudahkan proses diskusi analitis peneliti.

Langkah- Langkah penggunaan Atlas.ti sebagai berikut :

- Membuat proyek klik *New Project*
- Menambahkan dokumen berupa teks, grafik, file, audio, dan video
- Melakukan *Coding* untuk mengidentifikasi kata kunci kode menurut pemikiran individu
- Membuat jaringan semantik atau terminologis dari kode yang sudah dibuat

1.10.10. Kualitas Data atau Validitas Data

Sugiyono (2014:270) menguraikan bahwa penilaian terhadap kualitas data memerlukan triangulasi, analisis kasus negatif, observasi, ketelitian, dialog dengan subjek, dan mengembangkan data yang dikumpulkan. Triangulasi adalah pengecekan kredibilitas yang dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, di antaranya:

- a) Triangulasi Sumber : Strategi yang melibatkan analisis data dari berbagai sumber untuk memperkuat kesimpulan.
- b) Triangulasi teknik : Pendekatan yang melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk menganalisis dataset yang sama
- c) Triangulasi waktu : Pendekatan yang membandingkan data yang diperoleh pada waktu yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik triangulasi sumber yang menguji kebenaran data dengan menganalisis sumber data penelitian yang tidak berfokus pada satu informan saja tetapi juga hasil wawancara dengan informan yang berbeda. Kemudian data kualitatif yang telah diperoleh selanjutnya diuji kebenarannya dengan Teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi Pustaka dalam bentuk deskriptif